



LAPORAN KINERJA (LKJ) KECAMATAN KALUMPANG TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan Kalumpang ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Kalumpang Tahun 2025-2029.

Penyusunan Laporan Kinerja: Kementerian PANRB mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengisian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi pada Kecamatan Kalumpang. Kinerja Kecamatan Kalumpang diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kalumpang Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, bahkan ada satu indikator yang menunjukkan capaian melebihi target.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran organisasi dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Kalumpang pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara keseluruhan dalam mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.



Kalumpang, 09 Maret 2025

KAMAT KALUMPANG,

WAHYUDI NOOR, S.STP, M.I.P

Penata Tingkat I

NIP 19900107 201206 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	1
B. Mandat dan Peran Strategis	4
C. Sistematisa Pelaporan	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	5
A. Rencana Strategis.....	5
B. Perjanjian Kinerja 2025.....	10
C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Pengukuran Kinerja	15
B. Analisis Capaian Kinerja	28
C. Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP	51
D. Matriks Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP.....	53
E. Realisasi Anggaran	54
BAB IV PENUTUP	58

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Kalumpang Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Kalumpang pada Tahun 2025 memiliki tiga sasaran strategis dengan total tiga indikator kinerja, dan tiga target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap tiga(3) target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 target;
- 2) Target dengan capaian realisasi dibawah 100% sebanyak 1 target;

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Kalumpang Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tujuan: Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang responsif, transparan dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDUKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai Pada Pelayanan Internal Perangkat Daerah	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Petyaksanaan Pengaduan Masyarakat	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Persentase Ketercapaian Kinerja Kecamatan	80%	87,40%	84,25%

Kinerja keuangan Kecamatan Kalumpang Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp2.789.213.186,00 atau 70,67% dari total pagu anggaran yang dapat digunakan, yaitu Rp3.946.521.747,00. Pagu anggaran yang setelah dilakukan efisiensi sebesar Rp3.964.635.557,00. Capaian kinerja Kecamatan Kalumpang diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Kolaborasi internal maupun dengan pemangku kepentingan lain serta upaya inovatif sangat diperlukan untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

BAB I PENDAHULUAN

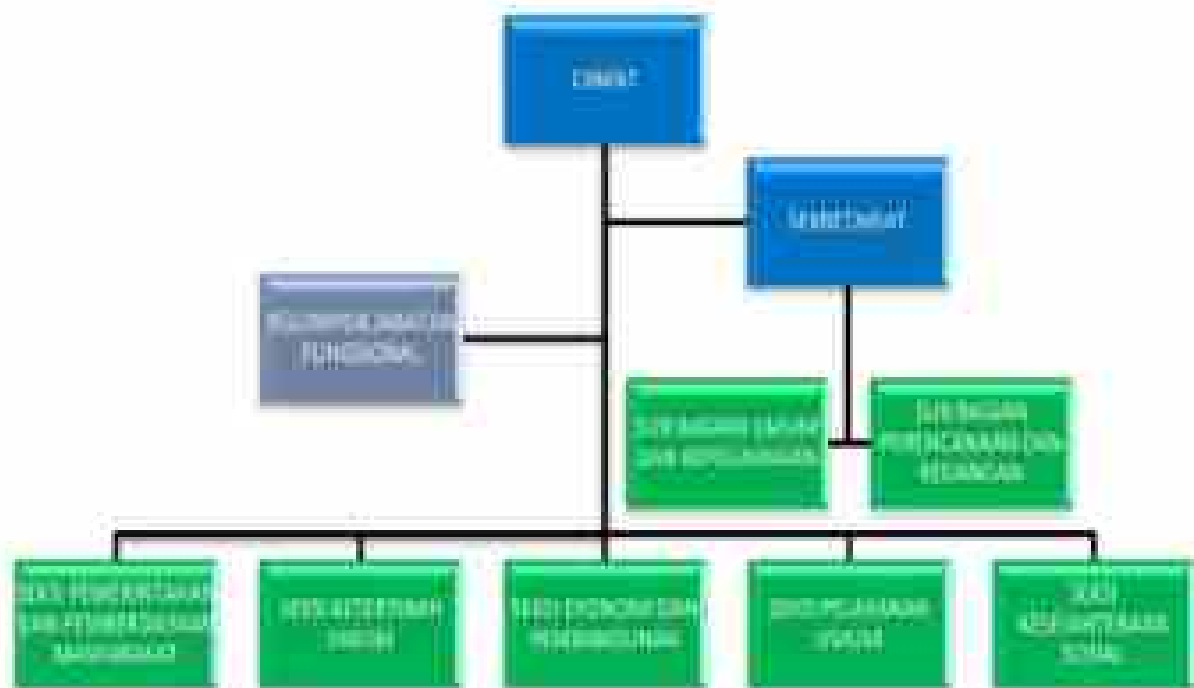
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kecamatan Kalumpang berfungsi sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Hulu Sungai Selatan yang dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kantor Kecamatan Kalumpang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana strategis, program dan rencana kerja Kecamatan;
 2. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum;
 3. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 4. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 5. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
 9. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kecamatan Kalumpang merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kalumpang maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Kumpang
(Sumber : Peraturan Bupati RSS No.78 Tahun 2026 Tentang SOTK Kecamatan)

1. Camat

Camat memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan, dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas Pemerintahan.

2. Sekretaris Kecamatan

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan, serta tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan

Sub Bagian Umum dan Kepegawain mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, inventarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawain dan ketatalaksanaan.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program, rencana kerja, rencana anggaran dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan serta laporan keuangan.

3. Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pertanahan.

4. Seksi Ketertiban Umum

Seksi Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta urusan ketertiban umum.

5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan produksi dan distribusi pelestarian lingkungan hidup dan swadaya masyarakat.

6. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan umum.

7. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan, kesehatan masyarakat, generasi muda, dan pemberdayaan perempuan dan olah raga.

B. Mandat dan Peran Strategis

Sebagai pelaksana perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Camat Kalumpang melaksanakan sebagian kewenangan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, Camat Kalumpang secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Kabupaten di wilayah Kecamatan Kalumpang. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan Kalumpang mempunyai peran yang sangat strategis di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya. Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Camat Kalumpang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara universal.

C. Sistematika Pelaporan

Laporan Kinerja Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan disusun dengan sistematika pelaporan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, serta mandat dan peran strategis Kementerian PANRB.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Prioritas Nasional/Kabupaten, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2025, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Berisi simpulan atas pencapaian kinerja, kendala dan saran untuk perbaikan kinerja berikutnya.

Lampiran

Berisi data-data lainnya yang diperlukan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Penyusunan Renstra Kecamatan Kalumpang Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis Kecamatan Kalumpang yang merupakan penajaman Program Kecamatan Kalumpang Tahun 2025 - 2026. Renstra Kecamatan Kalumpang diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Kecamatan Kalumpang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, pasal 50 dijelaskan bahwa kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Adapun dasar hukum pembentukan Kecamatan Kalumpang adalah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kalumpang Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Kalumpang dibidang pelayanan kepada masyarakat yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kalumpang Tahun 2025 - 2029 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Kalumpang Untuk menentukan sasaran, arah,

kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Kalumpang dalam jangka menengah:

- b. Sebagai dasar penilaian kinerja Kecamatan Kalumpang yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Isu strategis pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2025-2029 yang dirumuskan dan penting untuk diperhatikan diantaranya Good Governace dan Pelayanan Prima. Untuk mewujudkan Good Governace dan Pelayanan Prima dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas, professional dan proporsional dalam melaksanakan tugas pekerjaan dan jabatan. Dengan kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) PNS daerah yang dimiliki akan mampu mewujudkan pelayanan prima dalam bidang pelayanan masyarakat.

Kecamatan Kalumpang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/keurahan, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten serta tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk periode RPJMD 2025 - 2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

"Membangun Desa Menata Kota Mewujudkan Hulu Sungai Selatan Sejahtera, Mandiri, Agamis, Mengayomi & Teknologi (SEMANGAT)"

Bentuk kontribusi yang diberikan adalah melalui diarahkannya program- program pembangunan pada lingkup tugas pokok dan fungsi Kecamatan pada sasaran pembangunan ketatalaksanaan

Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Kalumpang Terhadap Pencapaian Visi, dan Misi Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi "Membangun Desa Mandiri Kota Mewujudkan Hulu Sungai Selatan Sejahtera, Mandiri, Agamis, Mengayomi & Teknologi (SEMANGAT)"				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Pemasaran Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangkas dan Dinamis melalui Transformasi Digital untuk Mewujudkan Birokrasi Produktif dan Kemudahan Berusaha			
1	Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	Lambatnya masyarakat dalam mencukupi pemenuhan berkas/data yang kurang lengkap	Kurang lengkapnya berkas/data sebagai persyaratan proses pelayanan	Kecepatan proses pelayanan administrasi perkantoran yang cepat dan tepat waktu
2	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Belum optimalnya usulan perencanaan sesuai kebutuhan	Kurang sinkronisasi perencanaan dengan kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan	Kebutuhan masyarakat harus terpenuhi dalam proses perencanaan
3	Program Penyusunan RKPD Kabupaten di Kecamatan	kurang pahamnya masyarakat tentang perencanaan pembangunan sesuai usulan yang dibutuhkan	perwakilan delegasi kecamatan tidak dapat mempertahankan usulan pembangunan dalam pelaksanaan musrenbang di kecamatan	kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan peningkatan perencanaan pembangunan yang berkualitas
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya pemberdayaan	rendahnya kemandirian dan kemampuan masyarakat	keinginan masyarakat dalam meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan
5	Program Penegakan Perda dan Perbup di Kecamatan	masih banyaknya pelanggaran dalam penegakan perda	kurangnya pahamnya masyarakat dalam penegakan peraturan-peraturan perundang-undangan	melakukan pemantauan dan monitoring dalam pelaksanaan penegakan perda

6	Program Fasilitas Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan	masih rendahnya kualitas fasilitas penanggulangan kemiskinan	perencanaan dan pemanfaatan anggaran belum optimal	monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan
7	Program Fasilitas Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	masih rendahnya kualitas fasilitas penyelenggaraan kecamatan sehat	perencanaan dan pemanfaatan anggaran belum optimal	monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan kecamatan sehat
8	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	masih rendahnya minat budaya baca masyarakat	rendahnya kemauan dan kemampuan masyarakat	keinginan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Linieritas antara Misi 5 RPJMD hingga Sasaran RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diacu oleh Kecamatan Kalumpang adalah sebagai berikut:

VISI

"Membangun Desa Menata Kota Mewujudkan Hulu Sungai Selatan Sejahtera, Mandiri, Agamis, Mengayomi & Teknologi (SEMANGAT)"

MISI 4

Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangkas dan Dinamis melalui Transformasi Digital untuk Mewujudkan Birokrasi Produktif dan Kemudahan Berusaha

Tujuan

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Sasaran

Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, Kecamatan kalumpang telah menetapkan tiga Sasaran Strategis beserta indikator dan target yang ingin dicapai sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Kalumpang Tahun 2025
Dalam Renstra Kecamatan Kalumpang Tahun 2025-2029

KEPRDIAN SASARAN RPJMD YANG SELEKSI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
011	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
7.01.0.00.0.00.00.0000 - Kecamatan Kalumpang											
Kecamatan Kalumpang Kecamatan Kalumpang Kecamatan Kalumpang	Kecamatan Kalumpang Kecamatan Kalumpang Kecamatan Kalumpang	Kecamatan Kalumpang Kecamatan Kalumpang Kecamatan Kalumpang	Kecamatan Kalumpang Kecamatan Kalumpang Kecamatan Kalumpang	0	0	0	0	0	0	0	
			Kecamatan Kalumpang Kecamatan Kalumpang Kecamatan Kalumpang	0	0	0	0	0	0	0	
			Kecamatan Kalumpang Kecamatan Kalumpang Kecamatan Kalumpang	0	0	0	0	0	0	0	
			Kecamatan Kalumpang Kecamatan Kalumpang Kecamatan Kalumpang	0	0	0	0	0	0	0	

Sumber : E SAKP HSS

B. Perjanjian Kinerja 2025

Upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Kalumpang 2025-2029, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Kalumpang ditandatangani oleh Camat Kalumpang pada Bulan Januari 2025.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Camat Kalumpang Tahun 2025

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai Pada Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Persen	100
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Persen	100
3.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Persentase Ketercapaian Kinerja Kecamatan	Persen	80

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 19.141.662
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 189.159.586
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 58.257.400
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 88.199.490
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 49.226.190
6.	Program Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 3.727.008.029

Pada Bulan Maret Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Camat Kalumpang ini mengalami perubahan. Perubahan disebabkan karena sudah dilantiknya Bupati terpilih untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk sasaran, indikator dan anggaran Kecamatan Kalumpang tidak berubah.

Pada Bulan Agustus Tahun 2025, Perjanjian Kinerja mengalami perubahan karena adanya perubahan DPA Tahun 2025. Untuk sasaran dan indikator tidak berubah. Yang berubah hanya anggaran Kecamatan Kalumpang.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Camat Kalumpang (Perubahan) Tahun 2025

	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai Pada Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Persen	100
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Persen	100
3.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Persentase Ketercapaian Kinerja Kecamatan	Persen	80

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 19.141.662
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 189.159.586
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Keterlibatan Umum	Rp. 116.257.400
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 88.199.490
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 49.226.190
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 3.727.008.029

Laporan kinerja ini, diuraikan berdasarkan perjanjian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel 2.3 di atas.

C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Anggaran Kecamatan Kalumpang Tahun 2025 adalah sebesar Rp4.130.992.357,00, namun dalam rangka efisiensi anggaran, anggaran mengalami pengurangan sebesar (Rp166.356.800,00) atau (4,20%) sehingga menjadi sebesar Rp3.964.635.557,00

Pada Rencana Kerja dan anggaran perubahan tahun 2025, terdapat pengurangan anggaran kembali sebesar Rp574.989,00 sehingga menjadi Rp3.964.060.568,00

Rincian anggaran untuk setiap program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Rencana Kerja dan anggaran perubahan tahun 2025

PROGRAM		RKA MURNI	RKA EFISIENSI	RKA PERUBAHAN	KETERANGAN
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.727.809.029	3.804.856.729	3.823.483.740	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.499.088	9.499.088	9.499.088	
2	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	3.130.887.004	3.130.917.004	2.994.434.410	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	316.391.701	204.441.701	305.433.251	
4	Pengadaan Jasa Pemungut Pajak Pemukiman Daerah	178.498.200	178.498.200	178.498.200	
5	Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Pemungut Pajak Pemukiman Daerah	83.725.078	83.725.778	75.823.778	
B.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.141.862	19.141.862	19.141.862	
1	Penyelenggaraan Urutan Pemertahanan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	19.141.862	19.141.862	19.141.862	
C.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	189.159.588	179.857.088	180.157.088	
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	189.159.588	179.857.088	180.157.088	
D.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	58.257.400	43.257.400	115.257.400	
1	Koordinasi Usaha Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	58.257.400	43.257.400	115.257.400	
E.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	55.159.490	55.294.490	75.754.490	
1	Penyelenggaraan Urutan Pemertahanan Umum Sesuai Peraturan Kepala Daerah	55.159.490	55.294.490	75.754.490	
F.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	49.226.190	49.226.190	49.226.190	
1	Penyaji, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	49.226.190	49.226.190	49.226.190	
JUMLAH		4.130.992.357	3.964.838.937	3.964.080.568	

Sumber : Kecamatan Kalumpang

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi 4 RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu "Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangkas dan Dinamis melalui Transformasi Digital untuk Mewujudkan Birokrasi Produktif dan Kemudahan Berusaha", khususnya dalam pencapaian Tujuan 4 yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)", Kecamatan Kalumpang menetapkan tujuan strategis "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik" yang efektif, efisien, dan responsif. Sasaran RPJMD yang ingin dicapai melalui tujuan strategis ini adalah meningkatnya tata kelola pelayanan publik berbasis digital. Kecamatan Kalumpang berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berbasis transformasi digital guna meningkatkan produktivitas birokrasi serta mempermudah proses layanan masyarakat.

Berdasarkan data dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten HSS, realisasi indikator IKM di tahun 2025 sebesar 98,571. Realisasi ini melebihi dari target, dengan capaian sebesar 100,38%. Kecamatan Kalumpang dengan target 87, realisasi 89,96, dengan capaian 103,4%. Adapun perbandingan realisasi indikator Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Kecamatan Kalumpang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perbandingan Capaian IKM Kabupaten HSS dengan Kecamatan Kalumpang

No.	Nama	2021	2022	2023	2024	2025
1	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	87,11	87,28	88,00	88,08	98,571
2	Kecamatan Kalumpang	84,41	85,58	86,72	88,79	89,96

Sumber : Bagian Organisasi Setda dan Kecamatan Kalumpang

Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kalumpang difokuskan pada sektor-sektor layanan dasar dan administrasi pemerintahan yang langsung dirasakan masyarakat. Sebagai implementasi dan misi tersebut, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, pendampingan, serta evaluasi berkala dilakukan guna memastikan pelayanan prima sesuai standar. Langkah ini bertujuan menciptakan birokrasi yang lebih produktif, tangkas, dan mampu beradaptasi dengan berbagai dinamika pelayanan publik.

A. Pengukuran Kinerja

Kinerja Kecamatan Kalumpang Tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Kalumpang Tahun 2025.

Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 94,75% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Mengacu pada Hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Kecamatan Kalumpang TA.2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai Publik Pelayanan Internal Perangkat Daerah	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Pemyelesaian Pengaduan Masyarakat	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Persentase Ketercapaian Kinerja Kecamatan	90%	87,40%	94,20%
Rata-rata capaian			94,75		

Sumber: E-SAKP HSS

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi dibawah 100% sebanyak 1 target; dan
- 2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 target;

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis kinerja untuk setiap sasaran Adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah

Dalam tahun 2025, pencapaian sasaran ini dilakukan melalui penguatan manajemen internal, peningkatan ketertiban administrasi perkantoran, optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana kerja. Pelayanan internal yang berkualitas diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Adapun target dan realisasi untuk sasaran strategis 1 ini sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Sasaran Strategis 1

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai Pada Pelayanan Internal Perangkat Daerah	%	100	100

Sumber: E SAKP HSS

Penjelasan hubungan antara sasaran, indikator, formulasi dan perhitungan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Formulasi dan Perhitungan Sasaran Strategis 1

No.	Sasaran	Indikator	Formulasi
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai Pada Pelayanan Internal Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah Pegawai yang Puan Terhadap Layanan}}{\text{Jumlah Pegawai yang Bersney}} \times 100$ $\frac{210000}{210000} \times 100 = 100\%$

Sumber: E SAKP HSS

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah pegawai yang disurvei yaitu 21 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5
Karakteristik Responden

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-Laki	11	52%
		Perempuan	10	48%
2	Pendidikan	SMA/Sederajat	4	19%
		D3	2	10%
		S1	13	61%
		S2	2	10%
3	Umur	30	1	5%
		33	1	5%
		34	1	5%
		35	4	20%
		36	1	5%
		37	1	5%
		39	1	5%
		41	1	5%
		42	1	5%
		43	1	5%
		47	1	5%
		48	2	10%
		54	1	5%
		56	2	10%
		57	1	5%
		58	1	5%

Sumber : Kecamatan Kalumpang

1.1 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Kepuasan Pegawai Pada Pelayanan Internal Perangkat Daerah Kecamatan Kalumpang Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Karena indikator kinerja tahun 2025 ini adalah indikator baru, yang sebelumnya belum digunakan sehingga tidak ada data pembandingan yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Meskipun tidak dilakukan perbandingan secara kuantitatif dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja tahun berjalan tetap dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan pertialan kinerja pada periode berikutnya.

1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Kepuasan Pegawai Pada Pelayanan Internal Perangkat Daerah Kecamatan Kalumpang Tahun 2025 dengan target akhir renstra

Untuk perbandingan Capaian Kinerja Persentase Kepuasan Pegawai Pada Pelayanan Internal Perangkat Daerah Kecamatan Kalumpang Tahun 2025 dengan target akhir renstra sebagaimana dalam tabel.

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Sasaran Kinerja Meningkatkan Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah Dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai Pada Pelayanan Internal Perangkat Daerah	%	100	100

Sumber : E SAKP HSS

1.3 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Kepuasan Pegawai Pada Pelayanan Internal Perangkat Daerah Kecamatan Kalumpang Tahun 2025 Dengan Capaian Kinerja Kecamatan Lain di Kabupaten HSS

Untuk perbandingan Capaian Kinerja Persentase Kepuasan Pegawai Pada Pelayanan Internal Perangkat Daerah Kecamatan Kalumpang Tahun 2025 dengan kecamatan lain di Kabupaten HSS sebagaimana dalam tabel.

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah Dengan Kecamatan Lain

No.	Kecamatan	2025		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Kalumpang	100	100	100
2	Padang Bulung	100	100	100
3	Telaga Lingsat	100	100	100
4	Angkinang	100	100	100
5	Kandangan	100	100	100
6	Simpur	100	100	100
7	Kalumpang	100	100	100
8	Daha Utara	100	100	100
9	Daha Selatan	100	100	100
10	Daha Barat	100	100	100
11	Sungai Raya	100	100	100

Sumber : Kecamatan Kalumpang

Sedangkan Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Kepuasan Pegawai Pada Pelayanan Internal Perangkat Daerah Kecamatan Kalumpang Tahun 2025 dan Standar Nasional Belum ada data pembandingan yang relevan dan spesifik untuk dapat digunakan baik di tingkat daerah lain, provinsi maupun tingkat nasional.

Gambar 3.1
Foto-Foto Kegiatan Survey Kepuasan Pegawai Pada Pelayanan Internal Perangkat



Sumber: Kecamatan Kalumpang

1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan Dan Faktor Penghambat Keberhasilan Serta Upaya Perbaikan Ke Depan

Tabel 3-8
Faktor Pendorong, Penghambat, dan Upaya Perbaikan Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah

No.	Indikator	Pendorong	Penghambat	Upaya Perbaikan
1	Kepuasan Pegawai Pada Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Sistem pengelolaan keuangan yang efisien dan terstruktur dengan baik di tingkat kecamatan memungkinkan pembayaran gaji dan tunjangan dilakukan tepat waktu. Ini memungkinkan adanya kondisi yang solid antara pihak terkait, baik dalam hal perencanaan anggaran maupun dalam hal eksekusi pembayaran, yang menjadi salah satu kunci keberhasilan. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi faktor penting. Infrastruktur dan fasilitas yang mendukung kelancaran pekerjaan ASN di kecamatan, seperti ruang kerja yang nyaman, alat kerja yang cukup, dan akses teknologi yang memadai, sangat mendukung tercapainya target kinerja. Kondisi kerja yang baik berkontribusi pada produktivitas ASN, yang akhirnya meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.	Kendala dalam sarana dan prasarana menjadi salah satu penghambat. Meskipun Kecamatan Kalumpang telah berusaha menyediakan fasilitas yang memadai, namun masih terdapat kekurangan dalam beberapa aspek, seperti ketersediaan alat kerja yang tidak merata di seluruh bagian Kecamatan Kalumpang. Hal ini dapat menghambat kelancaran pekerjaan ASN, mengurangi efisiensi dalam pelaksanaan tugas, dan mempengaruhi produktivitas kerja.	Perlu dilakukan evaluasi terhadap distribusi dan kondisi fasilitas yang ada, untuk mengidentifikasi kekurangan dan kebutuhan yang lebih spesifik di tiap bagian. Dengan demikian, pihak yang berwenang dapat menentukan prioritas perbaikan dan penyediaan fasilitas yang lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan operasional.

Sumber : Kecamatan Kalumpang

1.5 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

Kepuasan Pegawai Pada Pelayanan Internal Perangkat Daerah dapat dicapai melalui beberapa hal sebagai berikut:

a. Meningkatkan Ketepatan Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi PD

Salah satu faktor kunci yang menunjang tercapainya target 100% pada kepuasan pegawai terhadap pelayanan internal di Kecamatan Kalumpang adalah meningkatnya ketepatan penyusunan perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah. Pagu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp3.727.008.029,00 dan pagu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp9.499.098,00. Anggaran yang ada kegiatan ini digunakan untuk Penyusunan Dokumen Renstra, Renja Mumi/Perubahan, RKA Mumi/Perubahan dan semua dokumen SAKIP serta penyusunan LKJ.

Peningkatan kualitas pada aspek manajerial ini memberikan dampak signifikan melalui beberapa mekanisme berikut:

- 1) **Penyelarasan Program Kerja:** Perencanaan yang lebih tepat memastikan bahwa setiap program kerja yang disusun selaras dengan kebutuhan nyata pegawai dan organisasi, sehingga sumber daya dapat dialokasikan secara efisien untuk mendukung tugas pokok dan fungsi di tingkat kecamatan.
- 2) **Efektivitas Monitoring:** Dengan sistem evaluasi yang semakin akurat, setiap kendala dalam pelayanan internal dapat diidentifikasi lebih dini. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat sasaran untuk memperbaiki kualitas pelayanan secara berkelanjutan.
- 3) **Kepastian Alur Kerja:** Ketepatan dalam perencanaan menciptakan tata kelola administrasi yang lebih terstruktur. Kondisi ini memberikan kepastian bagi pegawai dalam bekerja, yang secara langsung berkontribusi pada tingginya angka indeks kepuasan pelayanan internal di lingkungan Kecamatan Kalumpang.

Melalui sinkronisasi antara perencanaan yang matang dan evaluasi yang objektif, Kecamatan Kalumpang mampu mempertahankan standar kinerja pelayanan yang baik dibandingkan dengan periode sebelumnya maupun dalam perbandingan antar wilayah kecamatan lainnya.

Tabel 3.9
Capaian Sasaran Program Meningkatkan Ketepatan Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi PD

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Program: Peningkat Urutan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi PD	Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi	%	100	100	100
	Regutan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	15	15	100
	Sub Kegiatan: • Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	• Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100
	• Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	• Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	10	100

Sumber: Kecamatan Kalumpang

Sebagaimana dijabarkan pada Tabel 3-9, program penunjang ini berhasil mencapai performa maksimal dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Indikator Kinerja: Keberhasilan diukur melalui Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi.
- 2) Realisasi Target: Kecamatan Kalumpang menetapkan target sebesar 100% dan berhasil merealisasikannya secara penuh (100%) pada tahun 2025.
- 3) Implikasi: Ketepatan waktu dalam siklus perencanaan dan evaluasi ini memastikan bahwa setiap kebijakan pelayanan internal memiliki landasan data yang akurat dan jadwal pelaksanaan yang disiplin.

Keberhasilan dalam aspek manajerial ini menempatkan Kecamatan Kalumpang pada posisi yang sangat baik. Hal ini membuktikan bahwa penguatan pada sistem perencanaan dan evaluasi merupakan strategi yang efektif dalam menjaga stabilitas dan kualitas pelayanan internal secara berkelanjutan.

Gambar 3.2

Foto-Foto Kegiatan Pendukung Sasaran Program Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi PD



Foto Penyusunan Renstra TA. 2025-2029 dan Foto Penyusunan LKJ

Sumber: Kecamatan Kalumpang

b. Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Keuangan PD

Capaian optimal pada tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan internal di Kecamatan Kalumpang dipengaruhi juga oleh aspek manajemen tata kelola organisasi. Salah satu faktor pendukung utama adalah Meningkatnya Ketepatan Penyusunan Keuangan Perangkat Daerah (PD). Pagu Kegiatan ini sebesar Rp2.958.895.594,00 yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran/prognosis serta laporan keuangan akhir tahun serta memastikan kecukupan anggaran untuk gaji dan tunjangan. Peningkatan pada aspek ini memberikan kontribusi nyata bagi organisasi dalam beberapa hal berikut:

- 1) Akuntabilitas dan Transparansi: Ketepatan dalam penyusunan keuangan memastikan bahwa seluruh anggaran dialokasikan sesuai dengan prioritas kebutuhan pelayanan internal, sehingga meminimalisir hambatan operasional yang disebabkan oleh kendala administratif keuangan.

- 2) **Kepastian Hak Pegawai:** Manajemen keuangan yang tepat waktu dan akurat menjamin kelancaran pemenuhan hak-hak finansial serta dukungan fasilitas kerja bagi pegawai, yang secara langsung berkorelasi positif terhadap indeks kepuasan mereka terhadap pelayanan internal.
- 3) **Efisiensi Pelaksanaan Program:** Dengan administrasi keuangan yang disusun secara presisi, setiap kegiatan operasional di Kecamatan Kalumpung dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang direncanakan, mendukung tercapainya target realisasi kinerja sebesar 100% sebagaimana yang ditunjukkan pada data perbandingan antar-kecamatan.

Melalui penguatan pada ketepatan penyusunan keuangan ini, Kecamatan Kalumpung mampu menciptakan iklim kerja yang kondusif dan profesional, yang menjadi fondasi utama dalam mempertahankan standar pelayanan internal yang baik.

Tabel 3.10
Capaian Sasaran Program Meningkatnya ketepatan penyusunan keuangan PD

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BASUPATENKOTA	Meningkatnya ketepatan penyusunan keuangan PD	Persentase ketepatan waktu penyusunan keuangan	%	100	100	100
	Kegiatan: ADMINISTRASI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	Terselenggaranya dokumen Keuangan Kecamatan sesuai standar	Jumlah dokumen Keuangan Kecamatan sesuai standar	Dokumen	12	12	100
	Pembiayaan Gap dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gap dan Tunjangan ASN	Jumlah Uang yang Menunggu Gap dan Tunjangan ASN	Uang / Bulan	21	21	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (SKPD)	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran (SKPD)	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	10	10	100
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	100

Sumber: Kecamatan Kalumpung

Dengan target kinerja sebesar 100%, Kecamatan Kalumpung berhasil merealisasikan seluruh target tersebut secara baik sehingga menghasilkan persentase capaian kinerja sebesar 100%. Keberhasilan ini mencerminkan

Kedisiplinan dan akuntabilitas aparatur dalam mengelola administrasi keuangan daerah, yang secara langsung menjadi salah satu faktor kunci penunjang tingginya tingkat kepuasan pelayanan internal di lingkungan Kecamatan Kalumpang.

Gambar 3.3

Foto-Foto Kegiatan Pendukung Sasaran Program Meningkatnya ketepatan penyusunan keuangan PD



Foto Penyusunan Pra RKA TA.2026 dan Foto Penyusunan Lap Keu Sumber Kecamatan Kalumpang

c. Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Perkantoran

Selain aspek manajerial pada perencanaan dan keuangan, pencapaian indeks kepuasan pegawai yang optimal di Kecamatan Kalumpang juga dipengaruhi secara signifikan oleh peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkantoran. Pagu pada kegiatan ini sebesar Rp308.430.251,00. Fokus pada penyediaan infrastruktur kerja yang memadai ini menjadi pilar penting dalam menunjang produktivitas dan kenyamanan lingkungan kerja, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Fasilitas Kerja yang Layak: Kualitas sarana dan prasarana yang meningkat memastikan bahwa seluruh aparatur di Kecamatan Kalumpang memiliki peralatan pendukung yang memadai untuk menjalankan tugas kedinasan secara efektif dan efisien.
- 2) Meningkatkan Kenyamanan Lingkungan Kerja: Kondisi fisik kantor yang baik secara langsung berkontribusi pada terciptanya lingkungan kerja yang kondusif. Hal ini merupakan variabel krusial yang mendorong terciptanya kepuasan pegawai terhadap pelayanan internal yang diberikan oleh organisasi.
- 3) Optimalisasi Pelayanan Publik: Infrastruktur perkantoran yang berkualitas tidak hanya berdampak pada internal pegawai, tetapi juga memperkuat kapasitas Kecamatan Kalumpang dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, sejalan dengan target capaian kinerja 100% yang telah ditetapkan.

Integrasi antara kualitas sarana fisik yang baik dengan ketepatan administrasi menjadi kunci utama bagi Kecamatan Kalumpang dalam mempertahankan standar keunggulan pelayanan internal.

Tabel 3.11
Capaian Sasaran Program Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana
Perkantoran

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	%	100	100	100
	Kegiatan ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan	Paket	12	12	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100
	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100

Sumber : Kecamatan Kalumpang

Berdasarkan Tabel 3.11 tentang capaian sasaran program meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran, Kecamatan Kalumpang telah melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkantoran. Program ini diarahkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi aparaturnya kecamatan melalui penyediaan fasilitas kerja yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan operasional. Indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan program ini adalah persentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dengan satuan persentase (%). Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 100%, sebagai bentuk

komitmen dalam memenuhi seluruh kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran yang telah direncanakan.

Hasil pelaksanaan program menunjukkan bahwa realisasi yang dicapai juga sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja pada indikator tersebut mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran di Kecamatan Kalumpang telah terlaksana secara optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai tersebut memberikan kontribusi positif dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, meningkatkan efektivitas kinerja aparatur, serta menunjang kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan sasaran program ini dapat dinilai berhasil dan memberikan dukungan yang signifikan terhadap peningkatan kepuasan pelayanan internal di lingkungan Kecamatan Kalumpang.

Gambar 3.4

Foto-Foto Kegiatan Pendukung Sasaran Program Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Perkantoran

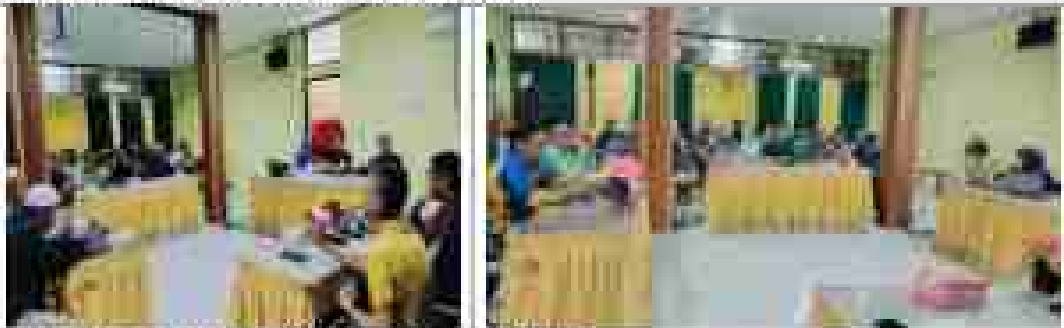


Foto Penyusunan RKBMD dan RKPMBD

Sumber: Kecamatan Kalumpang

1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun untuk tabel analisis atas efisiensi sasaran kinerja dan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Tabel Efisiensi Sasaran Kinerja 1

No	Sasaran Kinerja / Indikator Kinerja	Efisiensi Kinerja Rencana			Efisiensi Kinerja Program				
		Target Kinerja Rencana	Realisasi Kinerja Rencana	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Dakam	Realisasi (%)	Keterangan
1	Penyusunan dan Realisasi Pelayanan Internal Perkantoran (Kantor) Kecamatan Kalumpang Penyusunan dan Realisasi Pelayanan Internal Perkantoran Kecamatan Kalumpang	100%	100%	100%	2.275.000.000	2.275.750.000	100%	100%	Terlaksana

Sumber : Kecamatan Kalumpang

2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Efektivitas Penanganan Pengaduan Masyarakat Untuk Memastikan Terselesainya Setiap Aduan Secara Tuntas, Dengan Indikator Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

Sasaran strategis meningkatnya efektivitas penanganan pengaduan masyarakat merupakan bagian penting dalam upaya Kecamatan Kalumpang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, responsif, dan akuntabel. Penanganan pengaduan masyarakat menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, maupun laporan terkait pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, Kecamatan Kalumpang berkomitmen untuk memastikan setiap pengaduan yang diterima dapat ditangani secara cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kecamatan.

Dalam pelaksanaannya, Kecamatan Kalumpang menyediakan mekanisme dan saluran pengaduan yang mudah diakses serta melakukan pencatatan, verifikasi, dan tindak lanjut terhadap setiap pengaduan yang masuk. Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait juga dilakukan apabila pengaduan memerlukan penanganan lebih lanjut. Melalui upaya tersebut, diharapkan setiap pengaduan masyarakat dapat diselesaikan secara tuntas, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat akuntabilitas kinerja aparatur, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun target dan realisasi untuk sasaran strategis 1 ini sebagai berikut :

Tabel 3.13
Capaian Sasaran Strategis 1

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
Meningkatnya efektivitas penanganan pengaduan masyarakat untuk memastikan terselesainya setiap aduan secara tuntas.	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	%	100	100

Sumber : E SAKP HSS

Berdasarkan Tabel 3.13, Kecamatan Kalumpang menetapkan indikator kinerja berupa persentase penyelesaian pengaduan masyarakat dengan satuan pengukuran persentase (%). Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan setiap pengaduan yang diterima dari masyarakat secara tuntas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan untuk

indikator tersebut adalah sebesar 100%, yang mencerminkan komitmen Kecamatan Kalumpang dalam memastikan seluruh pengaduan masyarakat dapat diselesaikan secara optimal.

Penjelasan hubungan antara sasaran, indikator, dan formulasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13			
Formulasi dan Perhitungan Sasaran Strategis 2			
No.	Sasaran Strategis	Indikator	Formulasi
1	Meningkatnya efektivitas penanganan pengaduan masyarakat untuk memastikan terselesaikannya setiap aduan secara tuntas.	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan Yang D terselesaikan}}{\text{Jumlah Pengaduan Yang diterima}} \times 100$ $\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$

Sumber : E SAKP HSS

Berdasarkan Tabel 3.13 tentang formulasi Sasaran Strategis 2, Kecamatan Kalumpang menetapkan sasaran untuk meningkatkan efektivitas penanganan pengaduan masyarakat guna memastikan setiap aduan dapat diselesaikan secara tuntas. Sasaran ini mencerminkan komitmen Kecamatan Kalumpang dalam memberikan pelayanan yang responsif, transparan, dan akuntabel terhadap berbagai pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Penanganan pengaduan secara efektif menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai kualitas pelayanan publik serta kemampuan aparaturnya dalam merespons kebutuhan dan permasalahan masyarakat.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut adalah persentase penyelesaian pengaduan masyarakat. Perhitungan indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah pengaduan yang telah diselesaikan dengan jumlah pengaduan yang diterima, kemudian dikalikan 100 persen. Melalui formulasi tersebut, Kecamatan Kalumpang dapat mengetahui tingkat keberhasilan dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara terukur. Hasil pengukuran ini menjadi dasar dalam melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tabel 3.14								
Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2025								
No.	Tahun	Bulan	Aplikasi LAPOR	Lisan	Surat/Kotak Saran	UP3	Jumlah	Keterangan
1	2025	Januari	0	0	0	0	0	Nihil
2		Februari	0	0	0	0	0	Nihil
3		Maret	0	0	0	0	0	Nihil
4		April	0	0	0	0	0	Nihil
5		Mai	0	0	0	0	0	Nihil
6		Juni	0	0	0	0	0	Nihil
7		Juli	0	0	0	0	0	Nihil
8		Agustus	0	0	0	0	0	Nihil
9		September	0	0	0	0	0	Nihil
10		Oktober	0	0	0	0	0	Nihil
11		November	0	0	0	0	0	Nihil
12		Desember	0	0	0	0	0	Nihil

Sumber : Kecamatan Kalumpang

Berdasarkan Tabel 3.14 tentang Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2025, jumlah pengaduan masyarakat yang diterima oleh Kecamatan Kalumpang selama Tahun 2025 nihil. Pengaduan masyarakat dicatat melalui beberapa saluran, yaitu Aplikasi LAPOR, secara lisan, melalui surat/kotak saran, serta melalui Unit Pemantau Pelayanan Publik (UP3). Dari hasil rekapitulasi tahun 2025 dari bulan Januari sampai Desember, dengan keterangan nihil pengaduan.

Gambar 3.5
Aplikasi LAPOR Kecamatan Kalumpang



Sumber : Kecamatan Kalumpang

Sehingga dapat dikatakan kondisi pelayanan publik yang cukup baik, serta adanya upaya dari Kecamatan Kalumpang dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Capaian Persentase Peyelesaian Pengaduan Masyarakat tahun 2025 sesuai target, dengan capaian sebesar 100%.

2.1 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kalumpang Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Data realisasi kinerja pada Tahun 2024 tidak tersedia karena adanya perubahan sasaran strategis yang mulai diterapkan pada Tahun 2025, sehingga indikator kinerja tersebut belum digunakan sebagai dasar pengukuran pada tahun sebelumnya. Dengan adanya penyesuaian sasaran strategis tersebut, maka pengukuran kinerja terhadap indikator persentase penyelesaian pengaduan masyarakat baru dapat dilakukan pada Tahun 2025. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi pada Tahun 2025 mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh pengaduan masyarakat yang diterima telah berhasil diselesaikan secara optimal. Capaian ini mencerminkan komitmen Kecamatan Kalumpang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat akuntabilitas kinerja dalam penanganan pengaduan masyarakat.

2.2 Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Tahun Ini Dengan Target Akhir Renstra

Untuk perbandingan Capaian Kinerja Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kalumpang Tahun 2025 dengan target akhir renstra sebagaimana dalam tabel

Tabel 3.15				
Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya efektivitas penanganan pengaduan masyarakat untuk memastikan terselesaikannya setiap aduan secara tuntas Dengan Target Akhir Renstra				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra
Meningkatnya efektivitas penanganan pengaduan masyarakat untuk memastikan terselesaikannya setiap aduan secara tuntas	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	%	100	100

Sumber : E SAKP HSS

Berdasarkan data pada tabel 3.15, realisasi capaian kinerja pada Tahun 2025 sebesar 100%, capaian tersebut telah sesuai dengan target akhir Rencana Strategis (Renstra) yang juga ditetapkan sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sasaran strategis tersebut telah berjalan secara optimal dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Dengan tercapainya target akhir Renstra pada Tahun 2025, Kecamatan Kalumpang menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan efektivitas penanganan pengaduan masyarakat. Keberhasilan ini mencerminkan kinerja yang baik dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada penyelesaian setiap pengaduan masyarakat, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2.3 Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2025 Dengan Capaian Sasaran Strategis Kecamatan Lain di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Untuk perbandingan Capaian Kinerja Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kalumpang Tahun 2025 dengan kecamatan lain di Kabupaten HSS sebagaimana dalam tabel.

Tabel 3.16				
Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Efektivitas Penanganan Pengaduan Masyarakat Untuk Memastikan terselesaikannya Setiap Aduan Secara Tuntas Dengan Kecamatan Lain				
No.	Kecamatan	2025		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Kalumpang	100	100	100
2	Padang Batung	100	100	100
3	Telaga Langsat	100	100	100
4	Angkinang	100	100	100
5	Kandangan	100	100	100
6	Simpur	100	100	100
7	Lokaado	100	100	100
8	Daha Utara	100	100	100
9	Daha Selatan	100	100	100
10	Daha Barat	100	100	100
11	Sungai Raya	100	100	100

Sumber : Kecamatan Kalumpang

Berdasarkan Tabel 3.16 tentang Perbandingan Capaian Sasaran Strategis peningkatan efektivitas penanganan pengaduan masyarakat dengan kecamatan lain di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025, indikator yang digunakan adalah persentase penyelesaian pengaduan masyarakat dengan satuan persentase (%). Perbandingan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kecamatan Kalumpang dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat serta untuk melihat posisi capaian kinerja Kecamatan Kalumpang dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

Berdasarkan data tersebut, Kecamatan Kalumpang menetapkan target sebesar 100% dan berhasil mencapai realisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Capaian yang sama juga ditunjukkan oleh seluruh kecamatan

lainnya, yaitu Kecamatan Padang Batung, Telaga Langsung, Angkinang, Kandangan, Simpur, Loksado, Daha Utara, Daha Selatan, Daha Barat, dan Sungai Raya, yang masing-masing mencapai target dan realisasi sebesar 100%.

Keseragaman capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, termasuk Kecamatan Kalumpang, telah melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat secara efektif dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, dan akuntabel. Selain itu, capaian ini juga menunjukkan bahwa kinerja Kecamatan Kalumpang berada pada tingkat yang setara dengan kecamatan lainnya dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

2.4 Analisis Penyebab Keberhasilan Dan Faktor Penghambat Keberhasilan Serta Upaya Perbaikan Ke Kedepan

Tabel 3.17
Faktor Pendorong, Penghambat, dan Upaya Perbaikan Sasaran Strategis
Meningkatnya Efektivitas Penanganan Pengaduan Masyarakat Untuk Memastikan
Terselenggaranya Setiap Aduan Secara Tuntas

No.	Indikator	Pendorong	Penghambat	Upaya Perbaikan
1	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Optimanya implementasi sistem jemaatun berbasis digital melalui website SPAN Lapor, yang memungkinkan pengelolan aduan secara real-time, cepat, dan transparan. Selain itu, komitmen tinggi dari seluruh jajaran aparatur dalam merespon setiap pengaduan masyarakat secara efektif turut mendukung pencapaian tersebut. Ketersediaan petugas yang kompeten dalam pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan, serta koordinasi yang erat antar unit kerja dalam menyelesaikan permasalahan yang dilaporkan masyarakat menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap pengaduan dapat diselesaikan secara tepat waktu dan tuntas.	Masalah teknis seperti gangguan pada sistem website SPAN Lapor atau kesulitan dalam integrasi data antara berbagai unit kerja juga menjadi salah satu hambatan dalam penyelesaian pengaduan. Selain itu, kurangnya kesadaran dan pemahaman sebagian masyarakat mengenai prosedur pelaporan yang tepat, serta adanya kendala dalam komunikasi antara pengadu dan instansi terkait, dapat menghambat proses penyelesaian aduan yang tuntas.	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan penguatan tim pengelola pengaduan agar lebih responsif dan efektif dalam menangani setiap aduan yang masuk. Koordinasi antar unit kerja juga akan diperkuat dengan rutin mengadakan pertemuan evaluasi untuk memantau progres dan memperbaiki proses penyelesaian pengaduan. Selanjutnya, yakni sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur pelaporan yang benar akan dilakukan melalui berbagai kanal komunikasi agar masyarakat lebih memahami cara yang tepat untuk menyampaikan pengaduannya. Dengan langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan mempercepat penyelesaian pengaduan di masa mendatang.

Sumber : Kecamatan Kalumpang

2.5 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

Penyelesaian pengaduan masyarakat dapat dicapai dengan baik melalui beberapa hal sebagai berikut.

a. Meningkatnya Mutu Sarana Dan Prasarana Yang Mendukung Pelayanan Publik

Keberhasilan penyelesaian pengaduan masyarakat di Kecamatan Kalumpang tidak terlepas dari dukungan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan, dengan pagu sebesar Rp269.261.838,00. Salah satu faktor utama yang menunjang keberhasilan tersebut adalah meningkatnya mutu sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai memberikan kemudahan bagi aparatur kecamatan dalam menerima, mencatat, memproses, dan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat secara efektif dan terkoordinasi.

Sarana dan prasarana yang memadai, seperti fasilitas ruang pelayanan yang representatif, perangkat komputer, jaringan komunikasi, serta akses terhadap sistem pengelolaan pengaduan, memungkinkan proses pelayanan berjalan dengan lebih cepat, terib, dan akurat. Selain itu, kondisi lingkungan kerja yang baik juga mendukung peningkatan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan yang responsif dan profesional kepada masyarakat. Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, proses penanganan pengaduan dapat dilakukan secara optimal, sehingga setiap pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dengan demikian, peningkatan mutu sarana dan prasarana pelayanan publik menjadi salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap tercapainya target penyelesaian pengaduan masyarakat di Kecamatan Kalumpang. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan infrastruktur yang baik memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas pelayanan serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Tabel 3.18							
Capaian Sasaran Program Meningkatnya Mutu Sarana Dan Prasarana Yang Mendukung Pelayanan Publik							
No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya mutu sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan dalam Kondisi Baik	%	100	100	100
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik secara optimal	Jumlah Sarana Prasarana Pelayanan yang Disediakan	Paket	12	12	100
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100

Sumber : Kecamatan Kalumpang

Berdasarkan Tabel 3.18 tentang Capaian Sasaran Program Meningkatnya Mutu Sarana dan Prasarana yang Mendukung Pelayanan Publik, Kecamatan Kalumpang melaksanakan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan sasaran meningkatnya mutu sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik berada dalam kondisi baik dan layak digunakan, sehingga dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut adalah persentase sarana dan prasarana pelayanan dalam kondisi baik, dengan satuan pengukuran berupa persentase (%). Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 100%, yang mencerminkan upaya Kecamatan Kalumpang dalam memastikan seluruh sarana dan prasarana pelayanan publik berada dalam kondisi yang memadai. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi yang dicapai juga sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik di Kecamatan Kalumpang berada dalam kondisi baik dan berfungsi secara optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini

memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung kelancaran operasional pemerintahan, serta memperkuat kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat di Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



2.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun untuk tabel analisis atas efisiensi sasaran kinerja dan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Kinerja / Indikator Kinerja	Efisiensi Kinerja Sasaran			Efisiensi Kinerja Program				
		Tingkat Efisiensi Sasaran	Realisasi Kinerja Sasaran	Target Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)	Target Anggaran (Rp)	Capaian	Efisiensi (%)	Keterangan
1	Integrasi sistem informasi pemerintah yang terintegrasi, terpadu, dan terkoneksi	100%	100%	100%	200.000.000	200.000.000	100%	100%	Realisasi

Sumber : Kecamatan Kalumpang

3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Efektivitas Dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Sasaran strategis ini diarahkan untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Kalumpang agar berjalan secara optimal, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian terhadap indikator pada sasaran ini bersumber dari Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) Kalumpang. Nilai EKK merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kecamatan yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, pengelolaan anggaran, kepatuhan administrasi, hingga kualitas pelaporan kinerja. Oleh karena itu, capaian indikator pada sasaran ini secara langsung mencerminkan hasil penilaian atas keseluruhan tata kelola pemerintahan kecamatan. Melalui pendekatan tersebut, pengukuran kinerja tidak hanya berfokus pada jumlah kegiatan yang terlaksana, tetapi juga pada kualitas manajemen kinerja yang diterapkan. Nilai EKK menjadi gambaran objektif mengenai tingkat konsistensi antara perencanaan dan realisasi, ketepatan penggunaan anggaran, efektivitas pengendalian internal, serta keterlibatan dalam penyusunan laporan kinerja. Dengan menjadikan hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan sebagai dasar penilaian, Kecamatan Kalumpang menunjukkan komitmen dalam menerapkan prinsip *good governance* secara nyata. Evaluasi ini sekaligus berfungsi sebagai alat refleksi untuk mengidentifikasi aspek yang telah berjalan baik maupun area yang masih memerlukan perbaikan.

Secara keseluruhan, sasaran strategis ini tidak hanya menekankan pada pencapaian angka kinerja, tetapi juga pada penguatan sistem tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun target dan realisasi untuk sasaran strategis-1 ini sebagai berikut :

Tabel 3.19
Capaian Sasaran Strategis 3

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.	Persentase Ketercapaian Kinerja Kecamatan	%	80	84,25

Sumber : E SAKP HSS

Penjelasan hubungan antara sasaran, indikator, formulasi dan perhitungan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20			
Formulasi Sasaran Strategis 3			
No.	Sasaran Strategis	Indikator	Formulasi
1	Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Persentase Ketercapaian Kinerja Kecamatan	$\frac{\text{Rencana Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100$

Sumber : E SAKP HSS

Adapun Formulasi terhadap perhitungan capaian target adalah sebagai berikut:
Persentase Ketercapaian Kinerja Kecamatan pada tahun 2025 : Kecamatan Kalumpang Mendapat Nilai 673,95

$$\frac{673,95}{1000} \times 100 = 67,40$$

$$\frac{67,40}{80} \times 100 = 84,25$$

Tahun 2025 Sasaran Strategis peningkatan efektivitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan ditetapkan dengan target sebesar 80%. Realisasi yang dicapai sebesar 67,40 sehingga menghasilkan tingkat capaian kinerja sebesar 84,25% dengan kategori Baik.

Berdasarkan Tabel 3.20, Sasaran Strategis 3 berfokus pada peningkatan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Indikator yang digunakan adalah Persentase Ketercapaian Kinerja Kecamatan, yang mencerminkan tingkat keberhasilan realisasi kinerja dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Penilaian terhadap indikator ini bersumber dari Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) Kalumpang. Nilai EKK menjadi dasar dalam menggambarkan sejauh mana kinerja kecamatan telah berjalan sesuai perencanaan, baik dari aspek pelaksanaan program, pengelolaan administrasi, maupun pelaporan kinerja. Semakin tinggi nilai EKK yang diperoleh, semakin tinggi pula persentase ketercapaian kinerja kecamatan. Dengan demikian, data pada tabel tersebut tidak hanya menunjukkan angka capaian, tetapi juga merepresentasikan hasil evaluasi menyeluruh terhadap kualitas tata kelola pemerintahan di Kecamatan Kalumpang.

Gambar 3.7			
Daftar Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024			
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 100.3.3.2/265/KUM/2025 TENTANG PENETAPAN HASIL EVALUASI KINERJA KECAMATAN TERBAIK KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024			
DAFTAR HASIL EVALUASI KINERJA KECAMATAN TERBAIK KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024			
No	Kecamatan	Nilai	Peringkat
1	Bungur	721,82	I
2	Teranga Lingsel	713	II
3	Laksono	698,91	III
4	Daha Utara	598,58	
5	Kalumpang	673,95	
6	Daha Selatan	661	
7	Angkawang	648,58	
8	Bungur Paka	626	
9	Pelawa Hulu	589	
10	Daha Barat	588,58	
11	Perlongan	514	



Sumber: Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/265/KUM/2025

Gambar 3.7 menampilkan daftar hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/265/KUM/2025. Data tersebut memuat nilai dan peringkat kinerja seluruh kecamatan sebagai hasil evaluasi menyeluruh terhadap aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan kinerja.

Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, penilaian indikator pada Sasaran Strategis 3 bersumber dari Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK). Oleh karena itu, hasil pada gambar ini menjadi dasar objektif dalam menggambarkan tingkat efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Kalumpang.

Berdasarkan hasil evaluasi, Kecamatan Kalumpang memperoleh nilai 673.95 dan menempati peringkat ke-5 dari seluruh kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah terlaksana sesuai dengan perencanaan, meskipun masih terdapat selisih antara target dan realisasi. Capaian ini tetap mencerminkan bahwa sistem pengelolaan kinerja berjalan secara terarah dan terukur, serta selaras dengan hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) yang menempatkan Kecamatan Kalumpang dalam posisi kompetitif di tingkat kabupaten. Adapun Nilai EKK terdiri dari 6 komponen berikut ini :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
3. Penyelenggaraan Tugas Lainnya yang Ditugaskan Kepada Camat
4. Kompetensi Camat
5. Kapasitas Pengelolaan Kecamatan
6. Inovasi Kecamatan

Dari semua komponen tersebut, ada beberapa point yang masih belum dilangkapi Kecamatan Kalumpang untuk penilaian di tahun 2024 seperti inovasi pada pelayanan publik, inovasi pada tata kelola kecamatan dan inovasi lainnya sesuai dengan kewenangan camat. Sehingga nilai yang didapat sebesar 673,95 dari 1000 nilai total skor keseluruhan.

3.1 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Pada Tahun 2024 belum terdapat data realisasi, sedangkan pada Tahun 2025 realisasi tercatat sebesar 67,40%. Ketidadaan data pada tahun sebelumnya disebabkan karena sasaran dan indikator kinerja ini baru mulai diberlakukan pada Tahun 2025 sebagai bagian dari pembaruan perencanaan kinerja kecamatan. Oleh karena itu, Tahun 2025 menjadi titik awal pengukuran capaian untuk indikator tersebut.

Meskipun belum dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya, capaian Tahun 2025 tetap menjadi dasar penting dalam proses evaluasi. Nilai ini akan digunakan sebagai acuan dalam menilai perkembangan kinerja pada periode mendatang serta sebagai bahan perumusan langkah peningkatan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Kalumpang.

3.2 Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Tahun Ini Dengan Target Akhir Renstra

Untuk perbandingan Capaian Kinerja Meningkatnya Efektivitas Dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kalumpang Tahun 2025 dengan target akhir renstra sebagaimana dalam tabel.

Tabel 3.21 Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Efektivitas Dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Dengan Target Akhir Renstra				
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra
Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.	Persentase Ketuntasan Kinerja Kecamatan	%	67,40	80,05

Sumber : E-SAKP HSS

Pada Tahun 2025, realisasi yang dicapai sebesar 67,40%, sedangkan target akhir Renstra ditetapkan sebesar 80,05%. Perbandingan ini menunjukkan bahwa capaian tahun berjalan masih berada di bawah target jangka menengah yang telah direncanakan dalam dokumen strategis. Selisih tersebut menjadi gambaran bahwa meskipun kinerja berada dalam kategori baik, masih diperlukan upaya penguatan agar dapat mencapai standar yang telah ditetapkan secara penuh.

Data ini memberikan arah evaluatif yang jelas, yaitu perlunya peningkatan konsistensi dalam pelaksanaan program, penguatan pengendalian kinerja, serta optimalisasi tindak lanjut atas hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK). Dengan demikian, tabel ini tidak hanya menunjukkan perbedaan angka antara realisasi dan target, tetapi juga menjadi dasar perencanaan perbaikan untuk memastikan capaian kinerja pada periode mendatang dapat selaras dengan target akhir Renstra.

3.3 Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Tahun Ini Dengan Capaian Sasaran Strategis Kecamatan Lain

Untuk perbandingan Capaian Kinerja Meningkatnya Efektivitas Dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Kalumpang Tahun 2025 dengan kecamatan lain di Kabupaten HSS sebagaimana dalam tabel:

Tabel 3.22				
Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Efektivitas Dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Dengan Kecamatan Lain				
No.	Kecamatan	2025		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Sampur	80	72,19	90,23375
2	Telaga Langsat	80	71,50	89,375
3	Loksado	80	69,99	87,4875
4	Daha Utara	80	69,90	87,3725
5	Kalumpang	80	67,40	84,24375
6	Daha Selatan	80	66,40	83
7	Angklnang	80	64,90	81,12
8	Sungai Raya	80	63,60	79,5
9	Padang Batung	80	58,90	73,625
10	Daha Barat	80	58,90	73,6225
11	Kandangan	80	50,40	63

Sumber : Kecamatan Kalumpang

Tabel 3.22 menyajikan perbandingan capaian Sasaran Strategis peningkatan efektivitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan antar kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025. Seluruh kecamatan menetapkan target yang sama, yaitu sebesar 80%, sehingga perbandingan difokuskan pada tingkat realisasi dan persentase capaian masing-masing kecamatan.

3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan Dan Faktor Penghambat Keberhasilan Serta Upaya Perbaikan Ke Depan

Faktor pendorong pencapaian sasaran strategis meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yakni adanya komitmen Camat dan jajaran dalam meningkatkan kinerja serta mengarahkan seluruh perangkat kecamatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, koordinasi yang efektif antara kecamatan dan desa, serta instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Namun disisi lain, masih terdapat kekurangan Kecamatan Kalumpang atau yang merupakan faktor penghambat nya yakni keterbatasan jumlah pegawai dengan kemampuan teknis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, fasilitas kerja, perangkat teknologi, dan sistem administrasi belum sepenuhnya memadai yang menghambat kelancaran

pelaksanaan tugas dan tidak terkoordinir dengan jelas pegawai yang menangani inovasi kecamatan. Dengan adanya hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 yang sudah ditetapkan, memuat nilai dan peringkat kinerja seluruh kecamatan sebagai hasil evaluasi menyeluruh terhadap aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan kinerja. Maka kedepannya Kecamatan Kalumpang akan melakukan analisis penyebab target tidak tercapai, yakni pelatihan/pendampingan untuk meningkatkan kompetensi SDM, melakukan monitoring secara berkala untuk mengidentifikasi masalah sejak dini, meningkatkan koordinasi antar seksi/bagian di kecamatan menyusun rencana aksi yang lebih detail dan terukur, melibatkan semua pihak terkait dalam penyusunan rencana. Sehingga diharapkan bisa fokus pada kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak paling besar terhadap pencapaian sasaran dan bisa mencapai target yang telah ditetapkan.

3.5 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

Ketercapaian kinerja kecamatan dapat dicapai dengan baik melalui beberapa hal sebagai berikut:

a. Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Ketercapaian kinerja Kecamatan Kalumpang dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang terarah, khususnya dalam peningkatan kualitas fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan pagu sebesar Rp7.526.950,00. Fasilitasi tersebut diwujudkan melalui peran aktif kecamatan dalam mengoordinasikan proses perencanaan pembangunan secara partisipatif dan terstruktur.

Pada tahapan perencanaan Tahun 2025, Kecamatan Kalumpang melaksanakan Pra Musrenbang di tingkat kecamatan. Pelaksanaan ini bertujuan untuk melakukan konsolidasi dan penyaringan awal terhadap usulan dari desa-desa, memastikan kelengkapan administrasi, serta menyelaraskan prioritas kebutuhan dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Dengan pelaksanaan pra musrenbang, kecamatan memiliki ruang yang lebih optimal untuk melakukan

verifikasi dan pendalaman terhadap usulan, sehingga menghasilkan daftar prioritas yang lebih terukur dan realistis.

Selanjutnya, pada tahap Musrenbang Tahun 2026, pelaksanaannya dilakukan secara gabungan dalam lingkup Daerah Pemilihan (Dapil) I yang meliputi Kecamatan Kandangan, Sungai Raya, Simpur dan Kalumpang dengan lokasi pelaksanaan di Kecamatan Sungai Raya. Pelaksanaan secara terpadu ini mendorong sinergi antar kecamatan dalam menyelaraskan usulan prioritas pembangunan, memperkuat koordinasi lintas wilayah, serta meningkatkan efisiensi dalam proses pembahasan dan penetapan program.

Sinergi antara pelaksanaan pra musrenbang dan musrenbang gabungan per dapil memberikan dampak positif terhadap kualitas perencanaan kinerja. Proses yang sistematis tersebut meningkatkan ketepatan penentuan prioritas, memperkuat transparansi, serta mendukung kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program. Hal ini secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pencapaian target kinerja dan memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian, peningkatan kualitas fasilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, khususnya melalui mekanisme pra musrenbang dan musrenbang, menjadi salah satu faktor strategis yang menunjang keberhasilan kinerja kecamatan secara keseluruhan.

Tabel 3.23
Capaian Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Fasilitas
Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas fasilitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Pemertasa Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Efektif	%	100	100	100
	Kepala: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang Dikomode dalam Musrenbang Kabupaten	%	100	100	100
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	8	8	100

Sumber: Kecamatan Kalumpang

Tabel 3.23 menunjukkan capaian sasaran program Meningkatnya Kualitas Fasilitas dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini adalah persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan, dengan satuan persentase (%). Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 100% dan realisasi yang dicapai juga sebesar 100%, sehingga tingkat capaian program mencapai 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan fasilitasi yang direncanakan telah dilaksanakan secara penuh sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan bahwa fungsi koordinasi, pembinaan, serta pendampingan yang dilakukan kecamatan terhadap desa dan kelurahan telah berjalan optimal. Pelaksanaan Pra Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan yang terfasilitasi dengan baik menjadi bagian dari indikator keberhasilan ini, karena seluruh tahapan perencanaan dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan prosedur yang berlaku.

Secara keseluruhan, data pada tabel ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan dan fasilitasi pemerintahan desa telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung efektivitas dan akuntabilitas kinerja kecamatan. Pelaksanaan yang tepat sasaran dan terukur tersebut menjadi salah satu faktor pendukung tercapainya kinerja kecamatan dalam kategori baik pada tahun berjalan.



b. Meningkatnya Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Secara Terpadu Dan Berkelanjutan

Pencapaian kinerja Kecamatan Kalumpang turut ditopang oleh penguatan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan. Pada Program Pemberdayaan Masyarakat

Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, sub kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan dan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan pagu sebesar Rp172.630.136,00 Pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sosial dan partisipasi warga melalui dukungan kelembagaan serta pendampingan yang konsisten dari pihak kecamatan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pembinaan dan koordinasi kegiatan PKK di tingkat desa. Kecamatan berperan dalam memastikan program-program PKK berjalan sesuai arah kebijakan pembangunan, tertib administrasi, serta memberi manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam bidang kesejahteraan keluarga, kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, kecamatan juga melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial. Kegiatan ini meliputi pengecekan data penerima, pemantauan pelaksanaan di lapangan, serta evaluasi hasil distribusi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fasilitasi juga dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ). Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang pembinaan keagamaan dan pengembangan potensi generasi muda, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Kecamatan berperan dalam koordinasi, dukungan administrasi, serta penyelarasan kegiatan agar pelaksanaan MTQ berjalan tertib dan sesuai jadwal. Melalui integrasi kegiatan PKK, monitoring bantuan sosial, dan MTQ, Kecamatan Kelumpang mampu membangun pola pemberdayaan yang berkesinambungan. Pendekatan yang terpadu tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada penguatan efektivitas dan akuntabilitas kinerja kecamatan secara keseluruhan.

Tabel 3.24
Capaian Sasaran Program Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat Secara Terpadu Dan Berkelanjutan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Secara Terpadu Dan Berkelanjutan	Cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100
	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tertelaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	Dokumen	12	12	100

	Sub Kegiatan: Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	12	12	100
	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100

Sumber: Kecamatan Kalumpang

Tabel 3.27 menunjukkan capaian sasaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan fokus pada meningkatnya fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini adalah cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dengan satuan persentase (%). Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 100% dan realisasi yang dicapai juga sebesar 100%, sehingga tingkat capaian program mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan telah difasilitasi dan dilaksanakan secara penuh sesuai dengan perencanaan. Capaian tersebut mencerminkan optimalnya peran kecamatan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, termasuk pembinaan dan koordinasi kegiatan PKK, monitoring penyaluran bantuan sosial, serta fasilitasi kegiatan MTQ. Seluruh kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku, sehingga cakupan pelaksanaan mencapai target maksimal.



e. **Meningkatnya Kondisi Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Pelayanan**

Ketercapaian kinerja Kecamatan Kalumpang juga didukung oleh terjaganya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah pelayanan. Dalam Program Koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum, Kegiatan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dengan pagu sebesar Rp173.051.890,00. Stabilitas keamanan merupakan faktor fundamental dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan program pembangunan di tingkat kecamatan dan desa. Upaya peningkatan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), aparat keamanan, pemerintah desa, serta tokoh masyarakat. Sinergi tersebut diwujudkan dalam bentuk pemantauan wilayah, deteksi dini potensi gangguan ketertiban, serta penanganan permasalahan sosial secara cepat dan terkoordinasi. Pendekatan preventif lebih diutamakan agar potensi konflik atau gangguan keamanan dapat diminimalkan sejak awal.

Kondisi keamanan dan ketertiban yang terjaga memberikan dampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Proses pelayanan dapat berjalan lancar, kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan tanpa hambatan, serta koordinasi antar lembaga berlangsung dengan baik. Dengan demikian, peningkatan keamanan dan ketertiban menjadi salah satu faktor penting yang mendukung efektivitas dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kalumpang secara keseluruhan.

Tabel 3.25
Capaian Sasaran Program Meningkatnya Kondisi Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Pelayanan

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah pelayanan	Persentase pelanggaran perda dan peraturan yang ditangani	%	100	100	100
	Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tertakutannya koordinasi yang efektif dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kerja	Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi, Translumbung	%	100	100	100
	Sub Kegiatan: Sinergitas dengan Kapolres Negera Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tertakutannya Sinergitas dengan Kapolres Negera Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kapolres Negera Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100

Sumber : Kecamatan Kalumpang

Tabel 3.25 menampilkan capaian sasaran Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diarahkan pada peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah pelayanan. Keberhasilan program diukur melalui indikator persentase pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati yang berhasil ditangani, dengan satuan persentase (%). Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 100% dan seluruhnya dapat direalisasikan sebesar 100%, sehingga capaian program mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pelanggaran yang terdata selama periode tersebut telah dilindakanjut dan diselesaikan sesuai prosedur yang berlaku. Hasil ini mencerminkan efektivitas koordinasi dan pengawasan yang dilakukan oleh kecamatan beserta unsur

terkait dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Penanganan yang menyeluruh tersebut menunjukkan komitmen dalam penegakan aturan serta respons yang baik terhadap potensi gangguan di wilayah pelayanan. Secara umum, capaian maksimal pada program ini menunjukkan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dipelihara dengan baik, sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Kalumpang.



d. **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan Yang Transparan, Akuntabel, Dan Partisipatif**

Keberhasilan kinerja Kecamatan Kalumpang turut dipengaruhi oleh penguatan tata kelola pemerintahan desa yang semakin terbuka, bertanggung jawab, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, Kegiatan Fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan pagu sebesar Rp49.226.190,00. Pemerintahan desa yang tertib dan akuntabel menjadi fondasi penting dalam mendukung kualitas pelayanan dan pembangunan di tingkat kecamatan. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, kecamatan melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan desa secara berkesinambungan. Kegiatan ini meliputi peningkatan ketertiban administrasi, pendampingan penyusunan

laporan, serta penguatan pemahaman aparaturnya desa terhadap regulasi yang berlaku. Melalui pembinaan tersebut, proses penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi lebih sistematis, terdokumentasi dengan baik, dan mudah dipertanggungjawabkan. Selain itu, kecamatan juga memberikan fasilitas pembinaan terhadap BUMDes sebagai bagian dari penguatan ekonomi desa. Pendampingan difokuskan pada peningkatan kapasitas pengelola, pembenahan administrasi usaha, serta perbaikan tata kelola keuangan. Dengan pengelolaan yang lebih profesional, BUMDes diharapkan mampu meningkatkan transparansi serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengembangan potensi ekonomi desa. Upaya pembinaan administrasi dan penguatan BUMDes tersebut berkontribusi langsung terhadap terciptanya pemerintahan desa yang lebih tertib dan partisipatif. Secara tidak langsung, langkah ini juga mendukung peningkatan efektivitas dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kalumpang secara menyeluruh.

Tabel 3.26							
Capaian Sasaran Program Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan Yang Transparan, Akuntabel, Dan Partisipatif							
No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa/kelurahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	Persentase Desa/Kelurahan yang Menyelesaikan Laporan Kinerja Tepat Waktu	%	100	100	100
	Fasilitasi, rekomendasi dan koordnasu pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Tertaksananya Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan Desa yang Penyerapan Anggaran Melebihi 80%	%	100	100	100
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Tertaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difeasitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	12	12	100

Sumber : Kecamatan Kalumpang

Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 100% dan seluruhnya dapat direalisasikan sebesar 100%, sehingga capaian program mencapai 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Kalumpang telah melaksanakan tata kelola pemerintahan sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan efektivnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan kecamatan, serta meningkatnya

kesadaran aparat desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara tertib dan bertanggung jawab. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa sistem koordinasi dan pendampingan berjalan dengan baik sehingga desa mampu memenuhi standar administrasi dan pengelolaan yang telah ditentukan.

Secara keseluruhan, capaian maksimal pada program ini menggambarkan bahwa tata kelola pemerintahan desa di Kecamatan Kalumpang telah berjalan secara optimal dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan efektivitas serta akuntabilitas kinerja kecamatan secara menyeluruh.



C. Rekomendasi/Solusi pada LKIP Tahun Sebelumnya dan Realisasi di Tahun Pengukuran

Dari hasil evaluasi terhadap LKIP Tahun 2024 diantaranya:

a. Perencanaan Kinerja

- Berdasarkan RPD 2024-2026 dan Renstra 2024-2026, penjenjangan/cascading kinerja telah disusun dengan mengacu pada pohon kinerja yang bertujuan menjawab isu-isu strategis dan pokok permasalahan yang harus diselesaikan. Perencanaan PD telah mempertimbangkan critical success factor (CSF) pada kinerja taktis dan operasional sehingga mempengaruhi pencapaian kinerja yang ditetapkan;

- Rincian anggaran telah mencerminkan terkait kinerja yang akan dicapai;
- Pada dokumen perencanaan telah sepenuhnya mencantumkan terkait penjenjangan 4 level pohon kinerja (Ultimate-Intermediate-Immediate Output).

b. Pengukuran Kinerja

- Kualitas proses pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi rencana aksi telah ditingkatkan, hasil inputan mengenai realisasi telah dilengkapi dengan analisa data dan data dukung yang menggambarkan terkait dengan pencapaian kinerja yang dimaksud.
- Target kinerja yang dibreakdown secara triwulan pada level taktikal dan operasional pada e-SAKP telah sesuai dengan konteks kinerja yang harus diukur.

c. Pelaporan Kinerja

- Laporan Kinerja Perangkat Daerah telah sesuai dengan pedoman yang berlaku, dengan adanya pengembangan fitur assesmen mandiri kelengkapan kinerja. Perangkat Daerah telah mampu memberikan gambaran kualitas analisis dari laporan kinerja dan memberikan informasi berdasarkan komponen pelaporan.
- Pelaporan kinerja secara berkala yang dimuat di dalam e-SAKP telah terhubung untuk konteks yang sama di menu yang berbeda dengan standarisasi informasi yang harus diinput dan direvisi secara berjenjang.

d. Evaluasi Kinerja

- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang melalui Verifikasi e-SAKP dan dilakukan oleh Sekretaris.
- Evaluasi Akuntabilitas kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)
- Hasil evaluasi internal secara berkala (triwulan) pada verifikasi renaksi telah sepenuhnya menjadi masukan dan pertimbangan untuk melakukan langkah langkah pencapaian target pada triwulan berikutnya dan tahunan sehingga tercapai tujuan organisasi yang berdampak dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.

D. MATRIKS TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI INTERNAL AKIP TAHUN 2024

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Pelanggung Jawab	Status/Progres Penyusunan
1	Perangkat Daerah agar memastikan pohon kinerja telah sesuai dengan isi strategi sebagai dasar perencanaan 2025-2026 serta memastikan penjangkauan kinerja telah diimplementasikan secara konsisten dalam SPMD pada seluruh Program, Kegiatan dan Subkegiatan.	Melakukan peninjauan terhadap pohon kinerja untuk memastikan keselarasan dengan isi strategi sebagai dasar perencanaan 2025-2026. Memastikan penjangkauan kinerja telah diimplementasikan secara konsisten dalam SPMD di seluruh Program, Kegiatan, dan Subkegiatan.	RENSTRA PD	Januari - Agustus 2025	Camat Kalumpang	Tahap Penyusunan
2	Mengupdate secara berkala capaian kinerja Perangkat Daerah pada aplikasi e-SARIP dengan data dukung yang lengkap dan valid.	Memperbarui secara berkala capaian kinerja Perangkat Daerah pada aplikasi e-SARIP dengan data dukung yang lengkap dan valid.	E-SARIP	Setiap triwulan (Maret, Juni, September, Desember 2025)	Camat Kalumpang	Diperbarui setiap triwulan
3	Perangkat Daerah agar melaporkan hasil kinerja secara berkala yang dilengkapi dengan analisis, bukti dukung, faktor pendukung, faktor penghambat, dan rencana tindak lanjut pada aplikasi e-SARIP untuk mencapai pemenuhan target kinerja.	Melaporkan hasil kinerja secara berkala yang dilengkapi dengan analisis, bukti dukung, faktor pendukung, faktor penghambat, dan rencana tindak lanjut pada aplikasi e-SARIP untuk mencapai pemenuhan target kinerja.	E-SARIP dan Laporan Kinerja	Setiap triwulan (Maret, Juni, September, Desember 2025)	Camat Kalumpang	Diperbarui setiap triwulan
4	Perangkat Daerah agar mengkaji dan memantau e-SARIP secara berkala untuk memastikan rekomendasi hasil ditindaklanjuti dengan rencana tindak lanjut yang disertai revisi secara berjenjang oleh internal Perangkat Daerah terhadap efektivitas tindak lanjut yang telah dilakukan dan disesuaikan bila diperlukan.	Mengkaji dan memantau e-SARIP secara berkala untuk memastikan rekomendasi hasil ditindaklanjuti dengan rencana tindak lanjut yang disertai revisi secara berjenjang oleh internal. Mengevaluasi efektivitas tindak lanjut yang telah dilakukan dan disesuaikan bila diperlukan.	E-SARIP	Setiap triwulan (Maret, Juni, September, Desember 2025)	Camat Kalumpang	Diperbarui setiap bulan dan triwulan secara berkala

Sumber: Kecamatan Kalumpang

E. Realisasi Anggaran

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai, Kantor Kecamatan Kalumpang melaksanakan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 dengan jumlah Target Anggaran Rp. Rp3.946.521.747 dan untuk capaian realisasi Tahun 2025 adalah Rp2.789.213.186,00 atau 70,68% dari target realisasi anggaran. Realisasi anggaran Kecamatan Kalumpang secara rinci dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Tahun 2025
Kantor Kecamatan Kalumpang

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/Kegiatan tahun keagamaan		Anggaran Sub Kegiatan		
			I Tahun	II Juli	Anggaran	Realisasi	%
Program: Pembinaan Dan Pengembangan Pemerintahan Dasar	Fasilitas, Kecamatan dan Kecamatan Pembinaan dan Pengembangan Pemerintahan Dasar	Pembinaan Pemerintahan Kecamatan Dasar dan Kecamatan Kecamatan Dasar	90%	100%	15.437.488	15.411.881	99,94
		Fasilitas Kecamatan Tahun Pemerintahan Dasar	90%	100%	24.108.242	24.284.800	99,99
		Kontribusi Pemerintahan Dasar II Kecamatan	90%	100%	5.448.782	5.322.289	97,68
Program: Pembinaan Masyarakat Dasar Dan Kelurahan	Kegiatan: Pembinaan: Dasar	Pengembangan Masyarakat Masyarakat Dasar Masyarakat Dasar	90%	100%	7.588.882	7.482.782	98,60
		Desain dan Program Kerja dan Kegiatan Pembinaan Masyarakat yang Diakui dari Pemerintah dan Dinas di Wilayah Karya Kecamatan	90%	100%	7.017.884	6.914.782	98,64
		Pengelolaan Kegiatan Kegiatan Pembinaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	90%	100%	41.880.482	41.842.882	99,87
Program: Pembinaan Uraian Pembinaan Uraian	Pembinaan Uraian Pembinaan Uraian Pembinaan Uraian	Pembinaan Uraian dan Kegiatan Uraian	90%	100%	22.344.482	22.484.782	99,99
		Pembinaan Uraian dan Kegiatan Uraian	90%	100%	22.344.482	22.484.782	99,99
Program: Pembinaan Kecamatan dan Kecamatan (Kecamatan)	Kecamatan Uraian Pembinaan Kecamatan dan Kecamatan Uraian	Pembinaan Uraian dan Kegiatan Uraian	90%	100%	94.257.482	94.257.482	99,99
Program: Pembinaan Pembinaan dan Pembinaan (Kecamatan)	Pembinaan Uraian Pembinaan yang tidak Dipengaruhi oleh 100% dari Pembinaan dan yang tidak Pembinaan	Pembinaan Uraian dan Kegiatan Uraian	90%	100%	19.121.382	19.121.382	99,99
Program: Pembinaan Uraian dan Kecamatan (Kecamatan)	Kecamatan Uraian	Pembinaan Uraian dan Kegiatan Uraian	90%	100%	17.188.182	17.188.182	99,99
		Pembinaan Uraian dan Kegiatan Uraian	90%	100%	17.188.182	17.188.182	99,99
		Pembinaan Uraian dan Kegiatan Uraian	90%	100%	17.188.182	17.188.182	99,99
		Pembinaan Uraian dan Kegiatan Uraian	90%	100%	17.188.182	17.188.182	99,99

		Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Koridor SPOC	50%	100%	150.000.000	140.000.000	93,33
Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Pemerintahan Desa		Pembinaan Jasa Sosial Masyarakat	12 bulan	12 bulan	1.500.000	1.500.000	100
		Pembinaan Jasa Kesehatan, Budaya, Daya Tarik dan Lintas	12 bulan	12 bulan	42.499.000	37.906.173	89,25
		Pembinaan Jasa Pelayanan Sosial Kependidikan	12 bulan	12 bulan	111.887.000	95.471.800	85,35
		Pembinaan Jasa Pelayanan, Bina Pembinaan, Pj, dan Peningkatan Kendaraan Dinas Kecamatan dan Lingkungan	12 bulan	12 bulan	23.700.000	20.000.000	84,40
Pembinaan, Bina, dan Peningkatan Desa		Pembinaan/Perawatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	14.800.776	14.800.000	99,99
		Pembinaan/Perawatan, Simpan dan Pelayanan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	16.000.000	15.770.000	98,56
		Pembinaan/Perawatan Gedung dan Pelayanan Penyediaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	10.000.000	9.000.000	90,00
		Pembinaan/Perawatan Gedung dan Pelayanan Penyediaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	10.000.000	9.000.000	90,00
Pembinaan, Peningkatan dan Peningkatan Kualitas Pemerintahan Desa		Pembinaan/Perawatan/Perawatan Desa	10 Dok	10 Dok	2.000.000	2.000.000	100,00
		Desa dan Peningkatan/Perawatan Desa	5 Dok	5 Dok	1.000.000	1.000.000	100,00
Membina, Bina, dan Peningkatan/Desa		Pembinaan/Perawatan/Perawatan Desa	21 Dok	21 Dok	2.000.000.000	1.900.000.000	95,00
		Kendaraan dan Peningkatan/Perawatan Kendaraan/Perawatan/Perawatan Desa	1 Dok	1 Dok	1.000.000	1.000.000	100,00
		Kendaraan dan Peningkatan/Perawatan Kendaraan/Perawatan/Perawatan Desa	2 Dok	2 Dok	1.000.000	1.000.000	100,00
		Pembinaan/Perawatan/Perawatan Desa dan Peningkatan/Perawatan Desa	1 Dok	1 Dok	1.000.000	1.000.000	100,00
TOTAL					2.946.521.747	2.789.213.186	70,68

Sumber : Kecamatan Kalumpang

Dari Anggaran yang tersedia sebesar Rp3.946.521.747,00 terealisasi sebesar Rp2.789.213.186,00 atau sebesar 70,68% ini karena terjadinya atau adanya efisiensi Anggaran.

F. Prestasi Yang di Capai Oleh Kecamatan Kalumpang 2025

Kantor Kecamatan Kalumpang sebagai salah satu Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada Tahun Anggaran 2025 meraih prestasi antara lain :

NO	TAHUN	JENIS KEGIATAN/LOMBA	PRESTASI YANG DICAPAI	INDIKAT
1.	2025	Lomba Dasaawara Ber PHS	JURRA 1	TK. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2	2025	Lomba Karaoke Tugu	JURRA 2	TK. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
3.	2025	Peringatan STM Negeri	-	TK. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
4	2025	Awarding PHK Kecamatan	JURRA 1	TK. KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
5	2025	Kader PHK Kecamatan	JURRA 1	TK. KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
6.	2025	Lomba Model Mini Keluarga	JURRA 1	TK. KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
7	2025	Lomba Hadiah PHK	JURRA 1	TK. KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
8	2025	Lomba STM	JURRA 1	TK. KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
9	2025	Lomba Dasaawara Ber PHS	JURRA 2	TK. KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
10	2025	Lomba APE	JURRA 1	TK. KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
11	2025	Lomba PHK Keluarga	JURRA 2	TK. KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
12	2025	Lomba Gawai Sambilan	JURRA 3	TK. KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
13	2025	Jambore Kader PHK	JURRA 2	TK. KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
14	2025	Lomba HPK	JURRA 2	TK. KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
15	2025	Lomba Peningkatan pada Jambore Kader Pengusaha	JURRA 2	TK. KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
16	2025	Lomba Jambore Kader Pemuda BISA	JURRA 1	TK. KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
17	2025	Lomba PHK	JURRA 1	TK. KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO	TARIKH	JENIS KEGIATAN/UMMA	PRESTASI YANG DICAPAI	INDUKSI
1	2	3	4	5
18	2020	Pengisian RYM Data Jember Raker Provinsi	JUMDA 1	TL. KABUPATEN NGULU BUNDU SECATAN

Sumber : Kecamatan Kalumpang

BAB IV PENUTUP

Secara umum, pelaksanaan kinerja Kecamatan Kalumpang pada tahun 2025 telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Misi 4 RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu "Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangkas dan Dinamis melalui Transformasi Digital untuk Mewujudkan Birokrasi Produktif dan Kemudahan Berusaha", khususnya dalam pencapaian Tujuan 4 yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)". Kecamatan Kalumpang menetapkan tujuan strategis "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik" yang efektif, efisien, dan responsif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk capaian sasaran kinerja yang ada di Kecamatan Kalumpang yakni Meningkatkan Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah, Meningkatkan Kualitas Layanan Masyarakat dan Meningkatkan Kinerja Kecamatan telah berhasil di capai sesuai dengan target yang ditetapkan. Kantor Kecamatan Kalumpang juga telah melaksanakan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 dengan jumlah Target Anggaran Rp. Rp3.946.521.747 dan untuk capaian realisasi Tahun 2025 adalah Rp2.789.213.186,00 atau 70,68% dari target setelah dilakukan efisiensi anggaran. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah mendukung pencapaian sasaran strategis secara cukup efektif dan efisien. Dari hasil pengukuran realisasi terhadap tiga target tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 target;
- 2) Target dengan capaian realisasi dibawah 100% sebanyak 1 target.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Kalumpang Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tujuan: Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang responsif, transparan dan berorientasi pada kepuasan Masyarakat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Persentase Keluasan Pegawai Rasio Pelayanan Internal Perangkat Daerah	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Petyekuasan Pengaduan Masyarakat	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Persentase Ketercapaian Kinerja Kecamatan	80%	87,40%	84,25%

Sebagai langkah ke depan, Kecamatan Katumpang akan terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor, mengoptimalkan pelayanan publik, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta meningkatkan kualitas layanan internal secara konsisten. Upaya tersebut diharapkan dapat mempercepat pencapaian sasaran strategis dan mendorong peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Rencana tindak lanjut ini disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2025. Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Melakukan evaluasi berkala terhadap standar pelayanan, menyempumakan mekanisme survei kepuasan masyarakat, serta meningkatkan responsivitas aparatur guna mendorong capaian Indeks Kepuasan Masyarakat agar dapat memenuhi dan melampaui target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

2. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Mengintensifkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal secara periodik, termasuk pemanfaatan aplikasi e-SAKIP dan sistem informasi pendukung lainnya, guna memastikan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.

3. Optimalisasi Pencapaian Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK)

Melakukan identifikasi mendalam terhadap faktor penyebab belum tercapainya target Persentase Ketercapaian Kinerja Kecamatan, serta menyusun langkah perbaikan yang terukur melalui peningkatan kualitas perencanaan, penguatan pengendalian internal, dan peningkatan kualitas pelaporan kinerja.

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Mendorong peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan teknis, bimbingan manajerial, serta penguatan pemahaman terhadap sistem akuntabilitas kinerja, guna mendukung terciptanya birokrasi yang profesional dan berorientasi pada hasil.

5. Optimalisasi Pengelolaan Anggaran

Meningkatkan ketepatan perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar tingkat penyerapan lebih optimal tanpa mengurangi prinsip efisiensi dan efektivitas, serta

memastikan setiap alokasi anggaran memberikan dampak langsung terhadap pencapaian sasaran strategis.

2. Penguatan Koordinasi dan Sinergi

Memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa, perangkat daerah terkait, serta unsur masyarakat guna mendukung pelaksanaan program yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Melalui pelaksanaan rencana tindak lanjut tersebut, diharapkan Kecamatan Kalumpang dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Kalumpang Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang telah dilaksanakan. Semoga apa yang tersaji dapat memberikan masukan untuk peningkatan kinerja Kecamatan Kalumpang di tahun-tahun yang akan datang.



Kalumpang, 09 Maret 2026
CAMAT KALUMPANG,

[Signature]
WAHYUDI NOOR, S.STP, M.P
Penata Tingkat I
NIP 19900107 201206 1 001

LAMPIRAN:

- 1) PK MURNI TA. 2025
- 2) PK PERUBAHAN TA. 2025
- 3) IKU
- 4) KUISIONER PELAYANAN
INTERNAL
- 5) SK EKK



**PERJANJIAN KINERJA CAMAT KALUMPANG
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WAHYUDI NOOR, S.STP, M.I.P**
Jabatan : **Pt. Camat Kalumpang Kabupaten Hulu sungai Selatan**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ENDRI, A.P, M.AP**
Jabatan : **Pj. Bupati Hulu Sungai Selatan**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

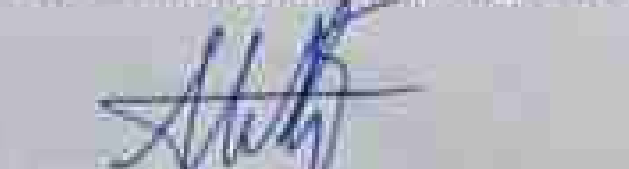
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Pj. Bupati Hulu Sungai Selatan


ENDRI, A.P, M.AP

Kalumpang, 02 Januari 2025

Pihak Pertama,
Pt. Camat Kalumpang Kab.HSS


WAHYUDI NOOR, S.STP, M.I.P
Penata Tingkat I
NIP. 19900107 201206 1 001

**PERJANJIAN KINERJA CAMAT KALUMPANG
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2025**

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai Pada Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Persen	100
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Persen	100
3.	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Persentase Ketercapaian Kinerja Kecamatan	Persen	80

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 19.141.662
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 189.159.586
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 58.257.400
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 88.199.490
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 49.226.190
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 601.308.557

Pihak Kedua,
Pj. Bupati Hulu Sungai Selatan,

 **ENDRI A.P.M.A.P**

Kalumpang, 02 Januari 2025
Pihak Pertama,
Plt. Camat Kalumpang
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

 **WAHYUDI NOOR, S.STP, M.I.P**
Penata Tingkat I
NIP. 19900107 201206 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAHYUDI NOOR, S.STP, M.LP
Jabatan : CAMAT KALUMPANG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. SYAFRUDIN NOOR, S.E, S.Sos
Jabatan : BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

 Pihak Kedua
H. SYAFRUDIN NOOR, S.E, S.Sos

Hulu Sungai Selatan, 6 Maret 2025

Pihak Pertama


WAHYUDI NOOR, S.STP, M.LP
NID. 180081078012081001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN KALUMPANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Persentase kepuasan pegawai pada layanan internal perangkat daerah	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100 %
3	Meningkatnya kinerja pemerintah kecamatan	Persentase Ketercapaian Kinerja Kecamatan	80 %

PROGRAM	ANGGARAN
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 3.456.788.753,00
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 289.360.938,00
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 189.159.586,00
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 146.456.890,00
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 49.226.190,00



B. WAHIDUN NOOR, S.E., S.Su

Hala Sungsai Selatan, 6 Maret 2023
 Pihak Pertama


WAHTUDI NOOR, S.STP, M.LP
 NIP. 139001071612001001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAHYUDI NOOR, S.STP, M.LP
Jabatan : CAMAT KALUMPANG | Plt. CAMAT KALUMPANG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. SYAFRUDIN NOOR, S.E, S.Sos
Jabatan : BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua
H. SYAFRUDIN NOOR, S.E, S.Sos

Hulu Sungai Selatan, 20 Agustus 2025

Pihak Pertama


WAHYUDI NOOR, S.STP, M.LP
NIP. 199001072012061001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN KALUMPANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Persentase kepuasan pegawai pada layanan internal perangkat daerah	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100 %
3	Meningkatnya kinerja pemerintah kecamatan	Persentase Ketercapaian Kinerja Kecamatan	80 %

PROGRAM	ANGGARAN
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 3.344.638.753,00
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 259.361.638,00
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 189.159.586,00
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 116.257.400,00
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 49.226.190,00


 Pihak Kedua
H. SYAFRUDIN NOOR, S.E, S.Sos

Hulu Sungai Selatan, 26 Agustus 2025
 Pihak Pertama


WARVUH NOOR, S.STP, M.P
 NIP. 19800107 2012061001



INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 KECAMATAN KALUMPANG

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Pengukuran	Pemangku Jarak	Saluran Data
III	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Melalui Penguatan SDM	Persentase kepuasan pengguna jasa pelayanan publik yang terdapat di Kecamatan	Tingkat kepuasan pengguna jasa pelayanan publik yang terdapat di Kecamatan	SARAF KALUMPANG	12.03.2025-30.03.2025
2	Peningkatan Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	Tingkat penyelesaian pengaduan masyarakat yang terdapat di Kecamatan	SARAF KALUMPANG	01.04.2025-30.04.2025
3	Peningkatan Indeks Partisipasi Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	SARAF KALUMPANG	01.05.2025-30.05.2025



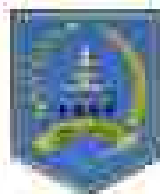


INDICATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 KECAMATAN KALUMPANG

No	Strategi Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Pengukuran	Pemangku Jarak	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat	Penurunan keluhan masyarakat terkait layanan publik yang diterima	Terdapat penurunan jumlah keluhan masyarakat yang diterima oleh instansi	CAKUT KALUMPANG	CAKUT KALUMPANG 2025
2.	Meningkatkan Kualitas Layanan Masyarakat	Penurunan keluhan masyarakat terkait pelayanan publik	Terdapat penurunan jumlah keluhan masyarakat yang diterima oleh instansi	CAKUT KALUMPANG	CAKUT KALUMPANG 2025
3.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat	Penurunan keluhan masyarakat terkait pelayanan publik	Terdapat penurunan jumlah keluhan masyarakat yang diterima oleh instansi	CAKUT KALUMPANG	CAKUT KALUMPANG 2025


 Kepala Desa,
 KECAMATAN KALUMPANG, S.D., S.P.
 NPM 144210001001001


 Kepala Desa,
 KECAMATAN KALUMPANG, S.D., S.P.
 NPM 144210001001001



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN KECAMATAN KALUMPANG

Jalan : Bolihari Km.14,5 Kalumpang Email : kecalumpang219@gmail.com
Kode Pos 71262

LAPORAN MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN INTERNAL PERANGKAT DAERAH

A. PENDAHULUAN

1. Umum/Latar Belakang

Pelayanan internal di lingkungan Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, merupakan fondasi penting dalam kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur kecamatan. Pelayanan internal mencakup koordinasi antar seksi, administrasi, dan pengelolaan sumber daya manusia yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Namun, kualitas pelayanan internal di Kecamatan Kalumpang masih menghadapi beberapa kendala, antara lain prosedur kerja yang belum sepenuhnya terstandar, koordinasi antar seksi yang belum optimal, serta kompetensi aparatur yang belum merata. Kondisi ini dapat memengaruhi efektivitas kinerja kecamatan dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, transparan, dan profesional, peningkatan kualitas pelayanan internal di Kecamatan Kalumpang menjadi kebutuhan mendesak. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur, memperkuat akuntabilitas, dan mendukung tercapainya pelayanan publik yang lebih baik.

2. Landasan Hukum

Landasan hukum peningkatan kualitas pelayanan internal di Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah, antara lain:

1. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, termasuk penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di tingkat kecamatan.
2. **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014** tentang Administrasi Pemerintahan, yang menekankan prinsip pelayanan yang cepat, tepat, dan profesional bagi penyelenggara negara dan aparatur.
3. **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016** tentang Perangkat Daerah, yang mengatur tugas, fungsi, dan kewenangan kecamatan sebagai pelaksana urusan pemerintahan di daerah.
4. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014** tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang menjadi acuan dalam peningkatan kinerja aparatur termasuk pelayanan internal.
5. **Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008** tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang menjadi dasar untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan administrasi internal di perangkat daerah.
6. **Instruksi Presiden dan Peraturan terkait Reformasi Birokrasi**, yang menekankan pentingnya pelayanan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berbasis standar operasional prosedur (SOP).
7. **Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan** tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai dasar kedudukan dan tugas Kecamatan Kalumpang.
8. **Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan** yang mengatur tugas, fungsi, dan tata kerja Kecamatan Kalumpang.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Peningkatan kualitas pelayanan internal di Kecamatan Kalumpang bertujuan menciptakan sistem kerja yang efektif, efisien, dan profesional untuk mendukung kelancaran tugas aparatur serta pelayanan publik yang lebih baik.

Tujuan :

Pengukuran kepuasan pegawai ini adalah untuk menilai efektivitas layanan yang diberikan serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki demi menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan mendukung produktivitas pegawai.

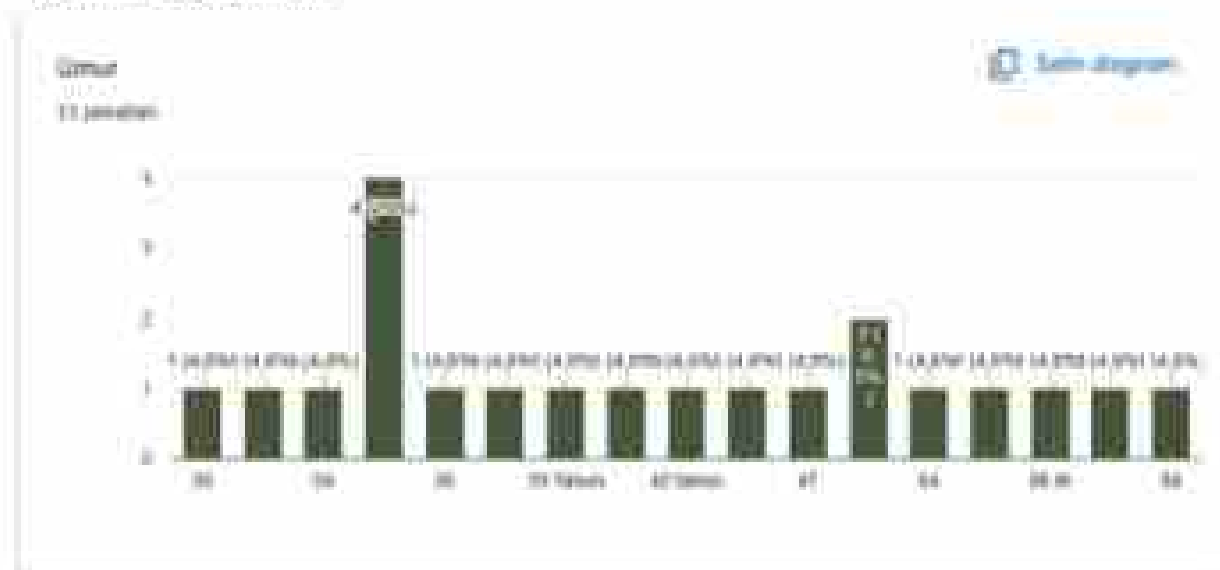
B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengisian Kuesioner kepada seluruh karyawan kecamatan Kalumpang

C. HASIL SURVEI

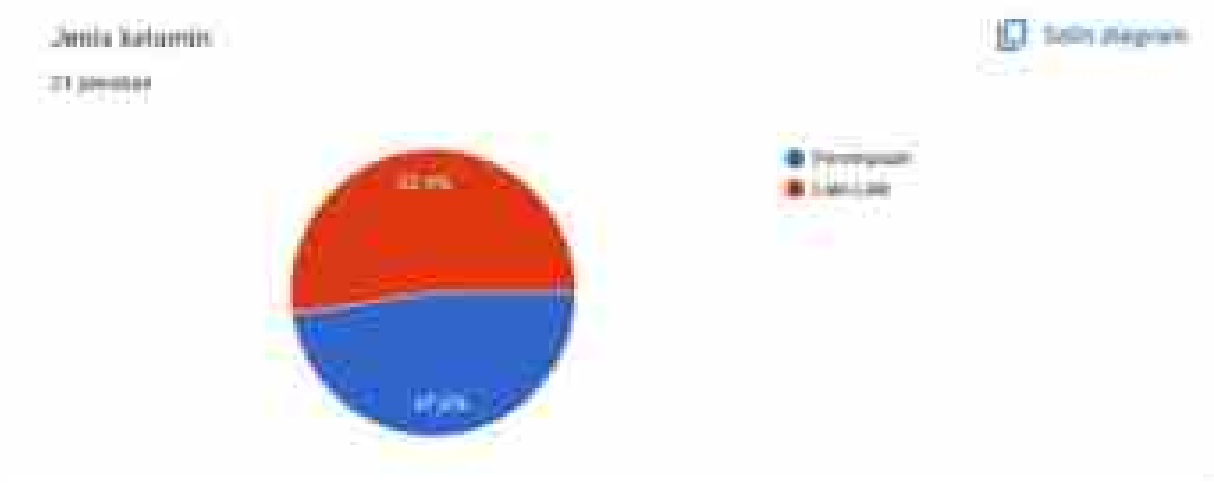
1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Umur mencerminkan kematangan seseorang dalam berpikir dan memberikan tanggapan. Karakteristik responden berdasarkan kelompok umur dapat memberikan informasi kelompok umur mana yang dominan sehingga peningkatan program pelayanan dapat diarahkan sesuai dengan karakter dan kebutuhan masyarakat pada diagram dibawah ini :



2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Kajian variabel jenis kelamin pada 21 orang responden dapat memberikan informasi kelompok mana yang paling dominan dan perlu mendapat prioritas dalam upaya peningkatan pelayanan, sehingga peningkatan kualitas pelayanan dapat dirancang dan diarahkan sesuai jenis kelamin yang dominan tersebut. Informasi yang diperoleh dari variabel jenis kelamin dalam survey ini dapat juga dijadikan sebagai bahan masukan untuk pengambilan kebijakan dan sebaran kegiatan pelayanan pada periode berikutnya. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin kami sajikan pada diagram dibawah ini:



3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Karakteristik responden ini dapat memberikan informasi tingkat pendidikan pengguna layanan Kecamatan Kalumpang. Informasi ini penting untuk memprediksi tingkat pengetahuan dan wawasan Pengguna, serta ekspektasi dan persepsi pengguna terhadap layanan internal pada kecamatan Kalumpang. Berdasarkan hasil survey yang paling dominan pada kecamatan Kecamatan Kalumpang adalah lulusan Diploma IV atau ST. Pada diagram dibawah ini:



D. NILAI HASIL SURVEI

Persentase kepuasan pegawai dapat dihitung dengan membandingkan jumlah pegawai yang merasa puas atau tidak puas terhadap layanan internal yang ada dengan total jumlah pegawai yang memberikan penilaian atau tanggapan. Formula untuk menghitung persentase kepuasan pegawai adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase Kepuasan Pegawai} = \frac{\text{Jumlah Pegawai yang Puas terhadap layanan}}{\text{Jumlah Total Pegawai yang disurvei}} \times 100\%$$

survey yang dilakukan pada Kecamatan Kalumpang mempunyai 13 pertanyaan dan untuk menilai Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Internal Kecamatan Kalumpang data hasil kuesioner yang diperoleh dari responden kami uraikan sebagai berikut:

KUESIONER ASPEK PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Bagaimana Tingkat Kepuasan Anda Terhadap Layanan Kecamatan Kalumpang?



27 jawaban



2. Bagaimana Tingkat Kepuasan Anda Terhadap Layanan Penyediaan Komponen Alat Listrik Pada Kecamatan Kalumpang?



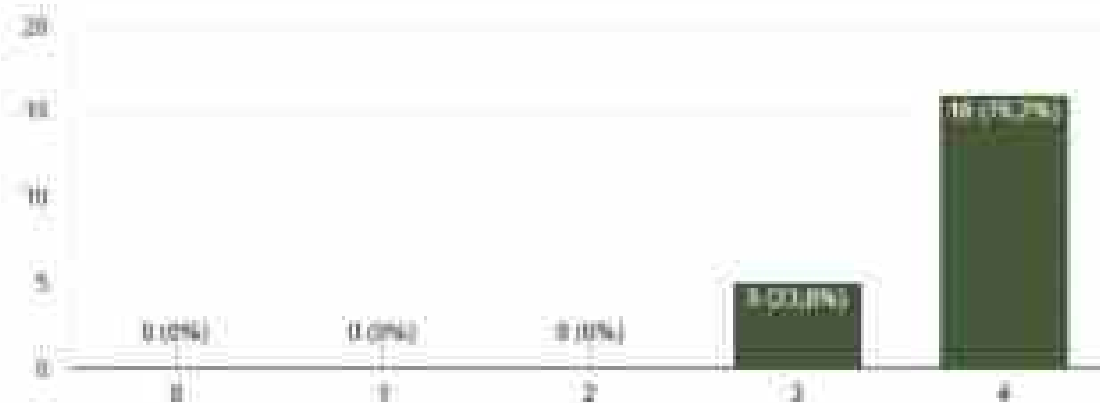
29 jawaban



3. Bagaimana Tingkat Kepuasan Anda Terhadap Layanan Penyediaan Barang Cetak (Map, Amplop) Pada Kecamatan Kalumpang ?

 Salin

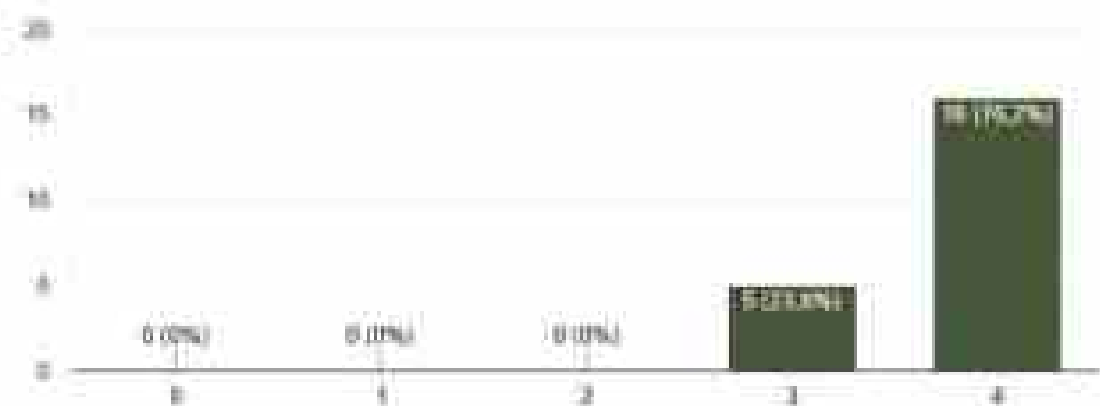
21 Jawaban



4. Bagaimana Tingkat Kepuasan Anda Terhadap Layanan Penyediaan Alat Tulis Kantor ?

 Salin

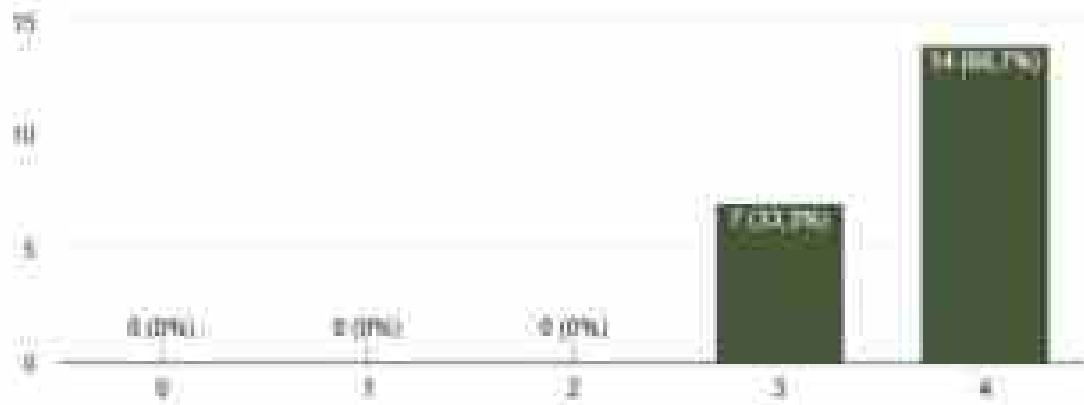
27 Jawaban



5. Bagaimana Tingkat Kepuasan Anda Terhadap Layanan Pembuatan Surat Tugas dan SPPD Pada Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan Kalumpang?



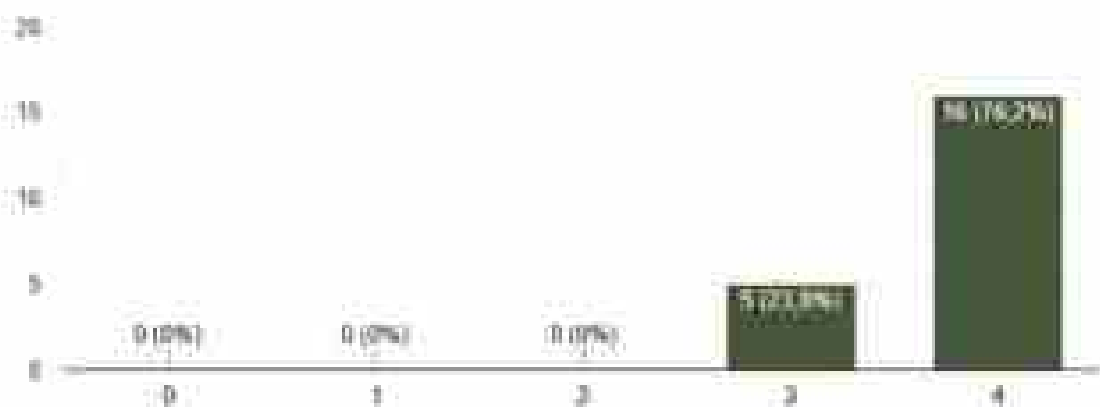
21 jawaban



6. Bagaimana Tingkat Kepuasan Anda Terhadap Penyediaan Alat dan Bahan Pembersih (Sapu, Tissue, Cairan Pembersih dan Pengharum) yang berpengaruh terhadap kebersihan kantor dan sarana lainnya (Lantai, Kaca, dan Toilet) Pada Kecamatan Kalumpang ?



21 jawaban

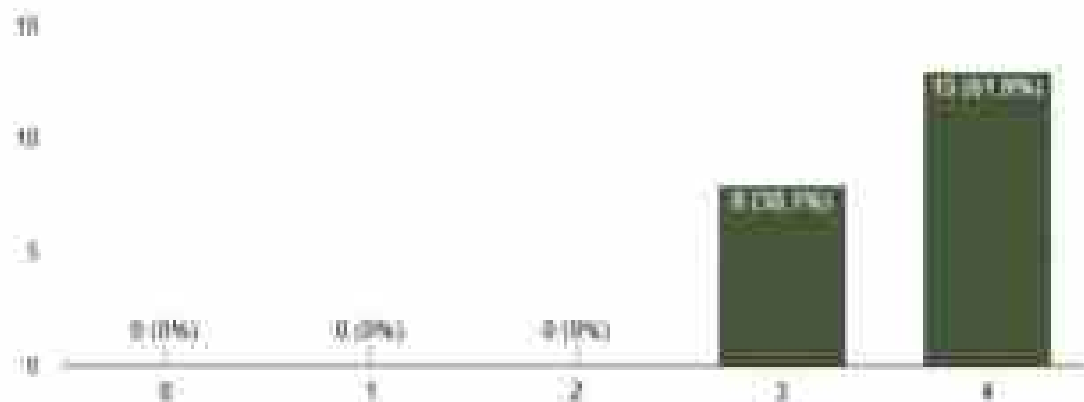


KUESIONER ASPEK PELAYANAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

7. Bagaimana Tingkat Kepuasan Anda Terhadap Kegiatan Pembayaran Gaji dan Tugasan Pada Kecamatan Kalumpang?

 Salin

21 jawaban



KUESIONER ASPEK PELAYANAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

8. Bagaimana Tingkat Kepuasan Anda Terhadap Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat Pada Kecamatan Kalumpang?

 Salin

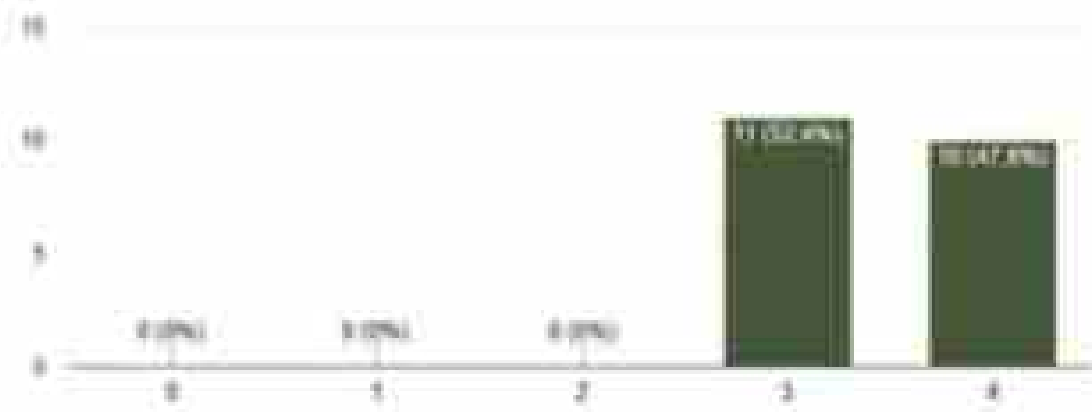
21 jawaban



9. Bagaimana Tingkat Kepuasan Anda Terhadap Penyediaan Air, Listrik dan Telepon Pada Kecamatan Kalumpang



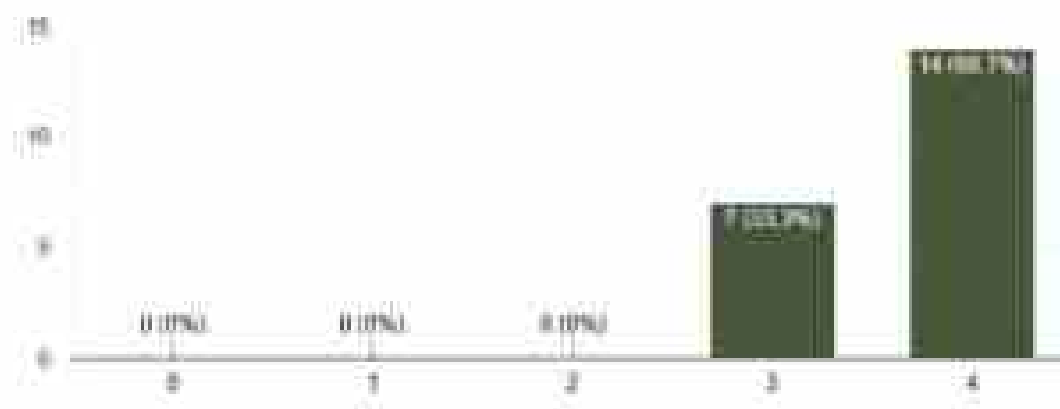
21 jawaban



10. Bagaimana Tingkat Kepuasan Anda Terhadap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Petugas Kebersihan, Supir) Pada Kecamatan Kalumpang ?



21 jawaban

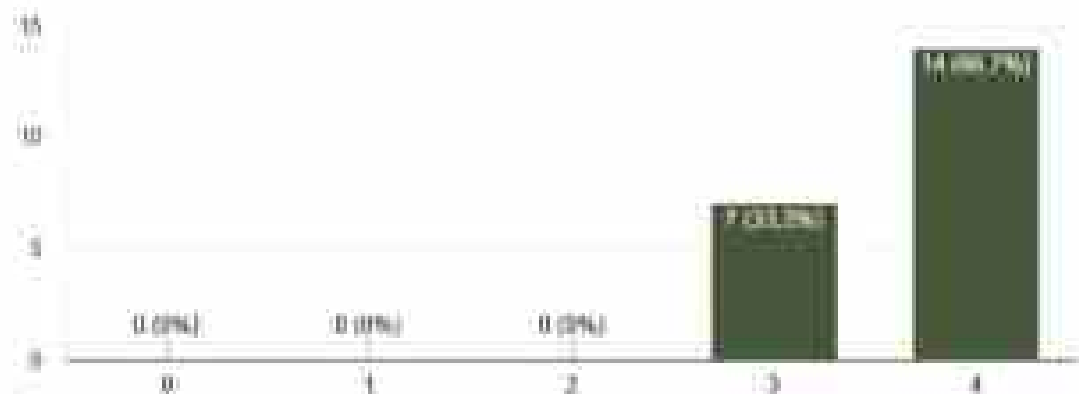


KUESIONER ASPEK PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH

11. Bagaimana Tingkat Kepuasan Anda Terhadap Pemeliharaan Barang Milik Kantor (Printer, Komputer, AC, Laptop serta sarana pendukung lainnya) Pada Kecamatan Kalumpang ?



21 jawaban

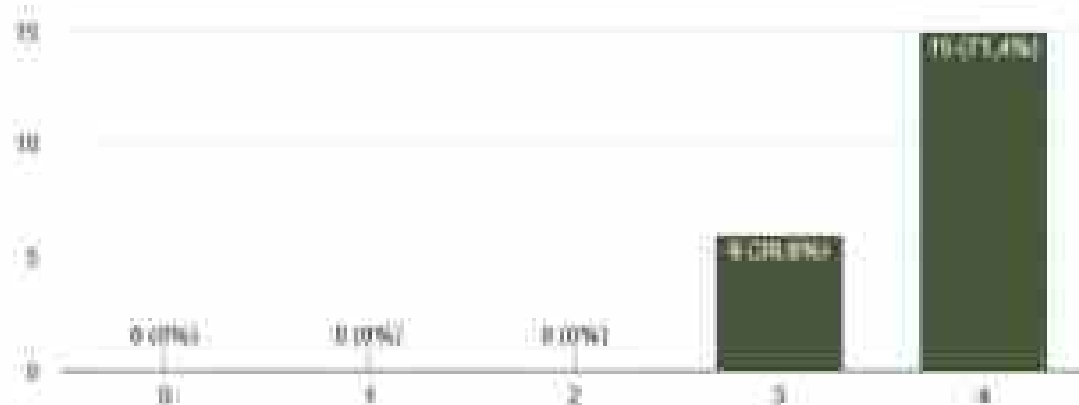


KUESIONER ASPEK LAYANAN KEPEGAWAIAN

12. Bagaimana Tingkat Kepuasan Anda Terhadap Layanan Cuti Pada Kecamatan Kalumpang



21 jawaban



13. Bagaimana Tingkat Kepuasan Anda Terhadap Layanan Kepegawaian Lainnya (Menakan Pangkat dan Berkala) Pada Kecamatan Kalumpang ?

21 responden



Dengan data diatas maka dapat dihitung persentase kepuasan pegawai sebagai berikut :

- Jumlah Responden : 21 Orang
- Jumlah Pegawai yang menilai puas : 21 Orang
- Jumlah Pegawai yang menilai tidak puas : 0 Orang

$$\text{Persentase Kepuasan Pegawai} = \frac{21}{21} \times 100\% = 100\%$$

Persentase kepuasan pegawai pada kualitas pelayanan internal perangkat daerah Kecamatan kalumpang Tahun 2025 adalah 100% (Puas).

E. PENUTUP

Pelaksanaan Pelayanan Internal pada Kecamatan Kalumpang, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik. Peningkatan kualitas pelayanan internal di Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertujuan mendukung kelancaran tugas aparatur dan tercapainya pelayanan publik yang lebih profesional, efisien, dan akuntabel. Diharapkan dokumen ini menjadi pedoman bagi aparatur kecamatan dalam menyempurnakan prosedur kerja dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan, sehingga berdampak positif bagi masyarakat.

Dibuat di : Kalumpang
Pada tanggal : 31 Desember 2023


CAMAT KALUMPANG,

WAHYUDI NOOR, S.STP, M.I.P
Penata TIK
NIP. 19900107 201206 1 001



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 2025 /KUM/2025
TENTANG**

**PENETAPAN HASIL EVALUASI KINERJA KECAMATAN TERBAIK
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024**

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Kecamatan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan Terbaik Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 5), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 36);
8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan Terhadap Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 10 September 2025

BUPATI ALY SUNDA SELATAN,

ABDURRUKIN NOOR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 255 /KUM/2025
TENTANG
PENETAPAN HASIL EVALUASI KINERJA
KECAMATAN TERBAIK KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

DAFTAR HASIL EVALUASI KINERJA KECAMATAN TERBAIK
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

No	Kecamatan	Nilai	Peringkat
1	Simpur	721.87	I
2	Telaga Langsat	715	II
3	Lokado	699.90	III
4	Daha Utara	698.98	
5	Kadumpung	673.95	
6	Daha Selatan	664	
7	Angkinang	648.96	
8	Sungai Raya	636	
9	Pedang Batu	589	
10	Daha Barat	588.98	
11	Kandangan	504	

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

STAF RUDIN NOOR